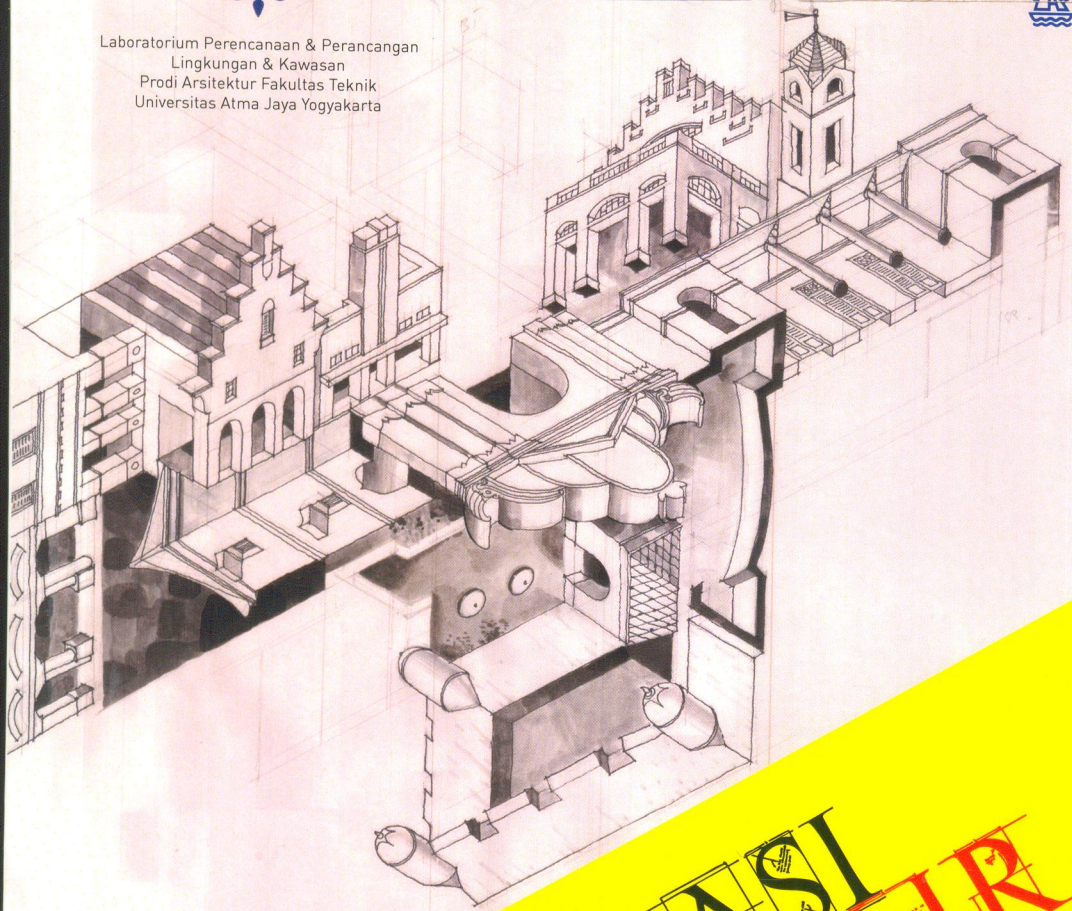




SAMPLE, TIDAK UNTUK DIJUAL



Laboratorium Perencanaan & Perancangan
Lingkungan & Kawasan
Prodi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



KONSERVASI ARSITEKTUR KOTA YOGYAKARTA

KONSERVASI ARSITEKTUR KOTA YOGYAKARTA



Laboratorium Perencanaan dan Perancangan
Lingkungan dan Kawasan
Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Penerbit Kanisius

Konservasi ARSITEKTUR Kota Yogyakarta

072352

© 2013 Kanisius

Buku ini diterbitkan atas kerja sama

LABORATORIUM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
LINGKUNGAN DAN KAWASAN, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kampus II Fakultas Teknik Gedung Thomas Aquinas
Jl. Babarsari No. 44, Yogyakarta, 55281
Telp : 0274-487711; Fax : 0274-487748
Email : pplk.uajy@gmail.com
Website : <http://ft.uajy.ac.id/arsitek>
Situs Kuliah : <http://kuliah.uajy.ac.id>

dan

PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281
Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
Website : www.kanisiusmedia.com
E-mail : office@kanisiusmedia.com

Cetakan ke- 3 2 1

Tahun 15 14 13

ISBN 978-979-21-3574-9

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

Tim Penyusun Buku adalah para dosen anggota Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Lingkungan dan Kawasan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Periode 2013/2014

Ir. Lucia Asdra R., M.Phil., Ph.D. (Penasihat & Reviewer Naskah)

Dr. Ir.Y. Djarot Purbadi, M.T. (Penasihat & Reviewer Naskah)

Dr. Amos Setiadi , S.T., M.T. (Penasihat & Editor Buku)

Ir. Ign. Purwanto Hadi, M.P. (Penasihat)

Ir. B. Sumardiyanto, M.Sc. (Penasihat)

Ir. Anna Pudianti, M.Sc. (Penasihat)

Catharina Dwi Astuti Depari, S.T., M.T. (Kepala Lab PPLK & Koord Buku)

Vincentia Reni Vita Surya, S.T., M.T. (Editor Buku)

Kontributor Naskah adalah para dosen arsitektur di Lingkungan Prodi Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. Amos Setiadi , S.T., M.T.

Augustinus Madyana Putra, S.T., M.Sc.

Gerarda Orbita Ida Cahyandari, S.T., MBS.Dev.

Yanuaris Benny Kristiawan, S.T., M.Sc.

Catharina Dwi Astuti Depari, S.T., M.T.

Vincentia Reni Vita Surya, S.T., M.T.

Desain Cover & Ilustrator Sketsa

Augustinus Madyana Putra, S.T., M.Sc.

Yanuaris Benny Kristiawan, S.T., M.Sc.

Daftar Isi

Kata Hantar	v
Kata Sambutan.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel.....	xx
Daftar Skema.....	xx
Daftar Grafik.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	3
PENDAHULUAN	
Catharina Dwi Astuti Depari	5
BAB II ARSITEKTUR KOTA YOGYAKARTA PERIODE ISLAM DAN KOLONIAL BELANDA	21
PENGARUH ISLAM TERHADAP RENCANA KOTA YOGYAKARTA	
Catharina Dwi Astuti Depari	23
KONSEP KOSMOLOGI SEBAGAI PENGHUBUNG PERISTIWA SOSIAL-POLITIK DAN ARSITEKTUR DALAM MASA KOLONIALISME	
Gerarda Orbita Ida Cahyandari	43
BAB III KASUS-KASUS KONSERVASI ARSITEKTUR.....	63
PENATAAN FASADE JALAN MONDORAKAN KAWASAN KOTAGEDE YOGYAKARTA	
Augustinus Madyana Putera.....	67

TRANSFORMASI POLA STRUKTUR RUANG KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA Catharina Dwi Astuti Depari	85
ARKETIPE KAMPUNG <i>NDALEM</i> SEBAGAI BAGIAN PEMBENTUK CITRA KAMPUNG KOTA YOGYAKARTA Amos Setiadi	121
BINTARAN: REKAM JEJAK ARSITEKTUR <i>INDISCHE</i> DI YOGYAKARTA Vincentia Reni Vita Surya	139
KONSEP <i>GARDEN CITY</i> DI KAWASAN KOTABARU YOGYAKARTA Yanuaris Benny Kristiawan	174
BAB IV KONSERVASI ARSITEKTUR KAMPUNG PERKOTAAN	205
PERMEABILITAS RUANG KAMPUNG PADA BLOK PERKOTAAN DI YOGYAKARTA:STUDI KASUS KAMPUNG JOGONEGARAN Amos Setiadi & Yohanes Basuki Dwisusanto	211
BAB V KESIMPULAN	229
ARAHAN BAGI PERENCANAAN KOTA YOGYAKARTA DI MASA DEPAN Amos Setiadi	231

PENDAHULUAN
Catharina Dwi Astuti Depari

Umum Kota-kota Tradisional

Kota-kota sebagai modernitas dan globalisasi yang melanda Indonesia mengakibatkan terjadinya perubahan pada pola kehidupan perkotaan. Perubahan yang terjadi semakin kompleks seperti Persepsi, Kita berpikir pada proses pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kini, kota-kota sebagai sebagai aspirasinya tidak ukur untuk menjadi kota-kota berbagai infrastruktur dan untuk melancarkan pembangunan kota-kota.

BAB I

PENDAHULUAN

Kota-kota sebagai modernitas dan globalisasi yang melanda Indonesia mengakibatkan terjadinya perubahan pada pola kehidupan perkotaan. Perubahan yang terjadi semakin kompleks seperti Persepsi, Kita berpikir pada proses pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kini, kota-kota sebagai sebagai aspirasinya tidak ukur untuk menjadi kota-kota berbagai infrastruktur dan untuk melancarkan pembangunan kota-kota.

Kota-kota sebagai modernitas dan globalisasi yang melanda Indonesia mengakibatkan terjadinya perubahan pada pola kehidupan perkotaan. Perubahan yang terjadi semakin kompleks seperti Persepsi, Kita berpikir pada proses pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kini, kota-kota sebagai sebagai aspirasinya tidak ukur untuk menjadi kota-kota berbagai infrastruktur dan untuk melancarkan pembangunan kota-kota.

Catharina Dwi Astuti Depari

PENDAHULUAN

Catharina Dwi Astuti Depari

Permasalahan Umum Kota-kota Tradisional

Besarnya dampak modernisasi dan globalisasi yang melanda kota-kota tradisional mengakibatkan sejumlah perubahan pada setiap aspek kehidupan perkotaan. Perubahan yang terjadi semakin sulit dikendalikan apabila Pemerintah Kota berpihak pada persoalan ekonomi semata. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kini, faktor ekonomi dianggap sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai kemajuan suatu kota. Berbagai infrastruktur dibangun untuk melayani kepentingan ekonomi kota tanpa mempertimbangkan dampak multidimensional yang mungkin terjadi. Permasalahan yang lahir sebagai dampak dari perubahan kota yang tidak terkendali antara lain degradasi kualitas lingkungan perkotaan, kesenjangan sosial-ekonomi warga yang semakin lebar serta ancaman terhadap citra atau identitas kota di tengah-tengah realitas budaya yang semakin pluralistik. Ambisi kota masa kini yang mengejar pertumbuhan ekonomi semata pada akhirnya hanya akan menciptakan suatu tatanan hidup perkotaan yang justru paradoks dari tujuan ideal kota yang selama ini dicita-citakan (Depari, 2013:1).

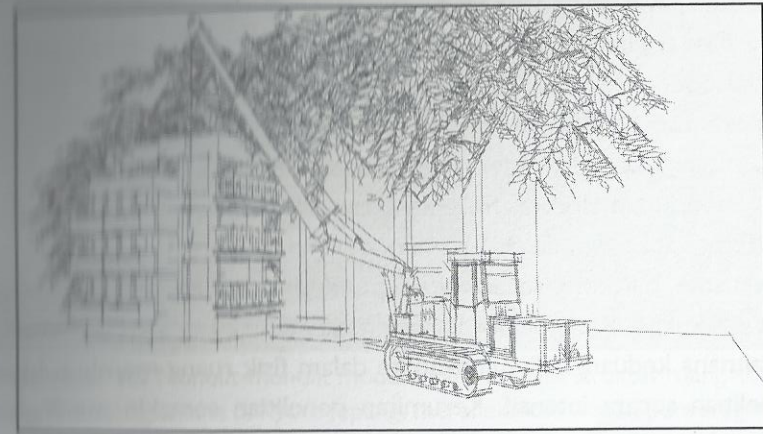
Desakan arus globalisasi yang terjadi pada kota-kota tradisional dapat melahirkan dualisme¹ budaya. Dualisme budaya dapat diamati dari perilaku dan pola aktivitas setempat yang mulai secara perlahan mengalami pergeseran. Bagi Pemerintah Kota, yang biasanya dihadapi adalah sebuah situasi dilematis ketika akan menentukan sejumlah

¹ Dualisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 (2012), berarti paham bahwa di dalam kehidupan terdapat dua prinsip yang saling bertentangan. Dalam konteks budaya, berarti adanya pertentangan antara paham modern dengan paham tradisional.

kebijakan, seperti pilihan antara kebijakan untuk mengeksploitasi seluruh lahan kota demi alasan profit versus kebijakan untuk memproteksi lahan-lahan kota demi alasan pelestarian. Secara fisik, kebijakan yang bersifat dualistik tercermin dari pola struktur ruang kota yang ambigu dan terpecah belah (*ambiguous-fragmented urban forms*). Dalam pola kota tradisional yang ambigu, integrasi antara ruang-ruang kawasan bernilai sejarah dengan ruang kawasan sekitarnya yang berkonsep modern merupakan sesuatu yang sangat sulit ditemukan.

Menghadapi wabah globalisasi, Pemerintah Kota saat ini dituntut untuk memikirkan secara serius berbagai isu konservasi serta menerapkan berbagai upaya pelestarian terhadap aset-aset kota yang bernilai historis. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga identitas kota dari berbagai krisis yang disebabkan oleh globalisasi. Dalam tataran fisik, krisis identitas yang melanda suatu kota dapat diamati dari perubahan yang terjadi pada struktur ruangnya yang secara bertahap mengalami proses penyeragaman bentuk dan karakteristik dengan bentuk ruang kota-kota modern pada umumnya. Selain isu penyeragaman karakteristik fisik kota, pembangunan masa kini yang berorientasi pada *economic gain* dapat pula mengakibatkan simbol-simbol kota sebagai elemen penting pembentuk identitas lokal mengalami perubahan atau bahkan penghancuran (Depari, 2013). Dalam jangka panjang, krisis identitas yang berlarut-larut akan berdampak pada psikologi warga kota seperti hilangnya kebanggaan lokal sebagai satu entitas dengan kota atau bahkan muncul perasaan terasing atau terisolir dari lingkungan sekitar. Selain itu, lahan-lahan kota yang seharusnya dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah kota justru diserahkan pada kekuatan pasar sehingga mendorong tumbuhnya bisnis properti secara pesat. Setiap inci lahan perkotaan senantiasa dilihat dari kaca mata profit. Semakin melambungnya harga lahan di daerah perkotaan pada akhirnya akan menciptakan sejumlah permasalahan baru yang tidak hanya menyentuh ranah pelestarian,

tetapi juga pada bidang permukiman. Harga lahan di daerah perkotaan yang tidak terjangkau mengakibatkan penyediaan lahan permukiman yang murah dan layak sangat sulit diperoleh, khususnya bagi warga kota yang miskin dan berpenghasilan rendah.



Gambar 1.1 Ilustrasi ancaman penghancuran terhadap aset historis kota
(Sumber gambar: dokumen penulis, 2013)

Bagi para pemerhati kota, permasalahan penyeragaman karakteristik fisik pada kota-kota tradisional yang semakin meningkat pada dasawarsa ini menciptakan sebuah kerisauan tiada akhir. Tarik menarik antara kebutuhan pelestarian dengan kebutuhan modern senantiasa terjadi dan tidak jarang sebagian besar konflik antara keduanya dimenangkan oleh kebutuhan modern. Berbagai penelitian Arsitektur yang khusus mengangkat topik proses transformasi yang terjadi pada struktur ruang kawasan dengan faktor-faktor pendorongnya pada dasawarsa ini tidak terhitung jumlahnya, baik dalam bentuk buku publikasi maupun dalam jurnal ilmiah. Beberapa penelitian di antaranya berusaha memahami desain ruang kota dan kawasan dengan pertamanya mencoba melakukan penelusuran sejarah dengan menggunakan

pendekatan tertentu. Penelitian tidak sekadar mengungkapkan hubungan timbal balik antarelemen fisik kota, tetapi turut menyentuh dimensi manusia sebagai penghuni ruang kota. Rapoport (1977) mengaitkan proses hubungan timbal balik antara terbentuknya suatu kota atau kawasan dengan masyarakatnya melalui konsep *socio-spatial* nya Hillier (Hillier dalam Lam, 2008) dengan konsep *spatial-culture* dan Madanipour (1996) dengan konsep *socio-spatial* yang secara intensif menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner untuk memahami desain ruang kota dan kawasan (Purbadi, 2008;34).

Meskipun secara fisik karakteristik konsep tradisional dan modern dapat dibedakan, namun dengan berkembangnya budaya eklektisme, dikotomi secara hitam putih di antara keduanya semakin sulit dilakukan. Kategorisasi karakteristik masing-masing konsep dan bagaimana keduanya diwujudkan ke dalam fisik ruang membutuhkan penelitian secara intensif. Kerumitan penelitian semakin meningkat karena kecenderungan kedua konsep tersebut yang semakin melebur menjadi satu entitas. Meskipun demikian, terdapat karakteristik umum yang membedakan. Indikator tradisionalitas adalah adanya konsep tematik, seperti sinkretisme, eklektisisme, mistikisme, simbolisme, ketaatan pada tradisi dan sejarah, pada sumber legitimasi, rancangan bersifat inkremental, bentuk lahir dari logika bahan semata dan lemahnya semangat inovasi. Sedangkan indikator modernitas adalah adanya semangat pembaruan (inovasi) dan reinterpretasi, rasional, kritis, a-historis, antisimbol, bentuk dilahirkan dari ide/gagasan tertentu yang multidimensi, kesetiaan pada pola/penataan dan bentuk mengikuti fungsi (Iskandar, 2004: 113).



Gambar 1.2 Monolit-monolit modern yang mengisi struktur ruang kota masa kini sebagaimana di Kyoto Jepang, merefleksikan wajah penyeragaman wajah kota sebagai dampak globalisasi.

(Sumber gambar: dokumen penulis, 2011)

Konservasi Arsitektur: Kenapa Penting?

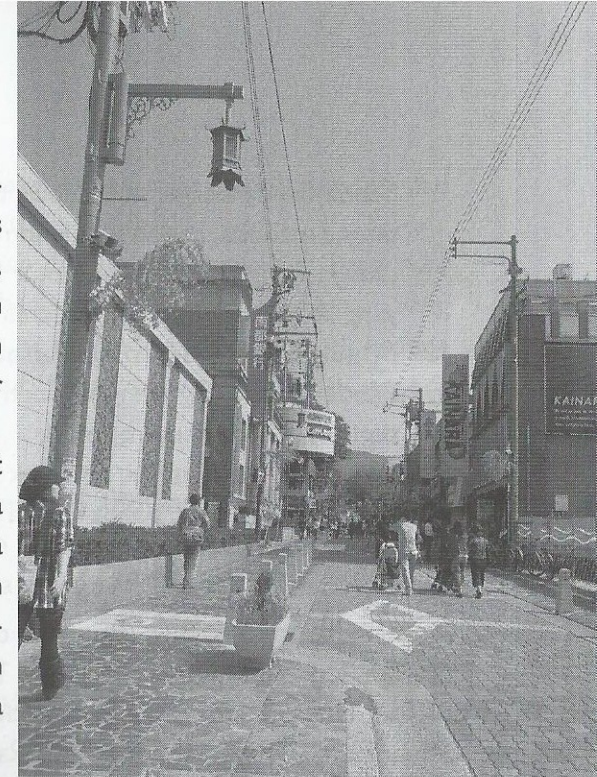
Melalui teori-teori yang dikemukakannya, Schultz (1980) menekankan peran arsitektur sebagai media untuk memvisualisasikan jiwa tempat. Tujuan arsitektur, menurutnya, adalah menciptakan tempat penuh makna yang memungkinkan manusia untuk dapat mengidentifikasi orientasi dirinya terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, setiap kota perlu memelihara identitas/cirinya sehingga dapat dibedakan dengan tempat lain (Schultz, 1980: 5). Meskipun demikian, menurut Garnham (1984), suatu kota dapat dikatakan ideal apabila perencanaannya memperlihatkan sebuah integrasi yang sinergis antara kebutuhan modern dengan tradisi, antara kebutuhan untuk

mengakomodasi perubahan dengan kelangsungan dari karakteristik setempat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), konservasi memiliki makna harafiah sebagai usaha pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan atau pelestarian, sedangkan konservasi arsitektur berarti usaha yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan atau pelestarian dari suatu identitas, integritas atau karakteristik suatu objek arsitektural. Menurut Budihardjo (*Architectural Conservations in Bali*, 1994: 8-9), terdapat tujuh faktor yang mendorong perlunya konservasi arsitektur, yaitu:

1. sikap untuk mempertahankan secara utuh seluruh kawasan tua sebagai tempat yang dapat memperkaya pengalaman visual, mengakomodasi hasrat akan keberlanjutan, menyediakan sebuah hubungan bermakna dengan masa lalu, dan memberikan kepada masyarakat pilihan untuk hidup dan bekerja di dalam lingkungannya, khususnya dalam kehidupan kontemporer saat ini;
2. dalam kehidupan yang sarat dengan perubahan dan pertumbuhan yang semakin cepat, kawasan-kawasan yang lebih tua dianggap memiliki atmosfer yang menyegarkan, kekal dan abadi sebagai sesuatu yang melegakan dan menarik;
3. mempertahankan bagian-bagian kota atau desa akan mendukung pelestarian jiwa tempat dan identitas kota/kawasan sekaligus menawarkan konsep-konsep kekontrasan dengan pembangunan masa kini;
4. kawasan tua dan perkotaan merupakan aset komersial terbesar dalam kaitannya dengan industri pariwisata;
5. merupakan tanggung jawab semua orang untuk menghargai dan merawat warisan budaya yang tidak ternilai harganya untuk tetap bertahan sehingga generasi baru di masa yang akan datang dapat belajar darinya dan menikmatinya;

6. warga membutuhkan perasaan aman secara psikologis untuk dapat menyentuh, melihat dan merasakan bukti fisik dari lingkungan sekitar dalam atmosfer tradisional;
7. warisan arsitektural dapat menyediakan sebuah data rekam historis dari masa lampau yang menyiratkan nilai keabadian dan kesinambungan sebagai lawan dari kehidupan manusia yang serba fana/terbatas.



Gambar 1.3 Dialog antara modernitas dengan tradisi berusaha dihadirkan melalui detail desain arsitektural di kawasan bersejarah Nara Prefecture, Osaka Jepang.

(Sumber gambar: dokumen penulis, 2011)

Ekar Budaya & Kriteria Konservasi

Menyadari pentingnya konsep jiwa tempat dalam pembangunan kota dan kawasan, Pemerintah Indonesia dituntut untuk mendukung gerakan konservasi terhadap seluruh aset atau cagar budaya secara utuh melalui aturan perundang-undangan dan produk kebijakan yang diterbitkan. Aturan yang melindungi usaha pelestarian cagar budaya di Indonesia, antara lain Monumeneren Ordonantie Stbl.238/1931, yang sebelumnya disebut sebagai M.O. 1931 (Sidharta & Budihardjo, 1989:9). Peraturan Stbl.238/1931 Pasal 1 menguraikan bahwa yang dianggap sebagai bangunan adalah:

1. benda-benda bergerak maupun tak bergerak, yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisasisanya, yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki langgam yang sedikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi presejarah, sejarah atau kesenian;
2. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut palaeoanthropologi;
3. situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad.1 dan ad.b.

Peraturan tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui UU Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 dan disempurnakan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, cagar budaya dapat didefinisikan pula sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Tetap terkait dengan objek konservasi, Sidharta & Budihardjo (1989) membagi cagar budaya menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. satuan areal, yang merupakan wilayah dalam kota yang dapat berwujud kawasan (bahkan keseluruhan kota itu sendiri), sebagai suatu sistem kehidupan, dianggap mempunyai ciri-ciri atau nilai khas kota;

2. satuan *visual/landscape* sebagai satuan yang mempunyai arti dan peran yang penting bagi suatu kota; dan
3. satuan fisik yang merupakan satuan yang berwujud bangunan, kelompok atau deretan bangunan, rangkaian bangunan yang membentuk ruang umum atau dinding jalan sampai kepada unsur bangunan baik unsur fungsional, struktur atau entesis ornamental.

Dalam merencanakan konservasi terhadap suatu cagar budaya, tentunya dibutuhkan sejumlah kriteria pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh tim perencana berikut ini.

1. Nilai estetika
 - Bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili keindahan khusus dari suatu langgam sejarah tertentu. Tolok ukur dari estetika dikaitkan dengan nilai keindahan dan kerumitan bentuk arsitekturalnya terkait dengan bentuk, struktur, tata ruang dan ornamennya. Kriteria estetika bersifat subjektif/berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk menentukan bahwa suatu bangunan lebih penting dari yang lain.
 - Kejamakan arsitektural.
2. Nilai kejamakan arsitektural (*value for architectural diversity*). Bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili satu kelas atau kelompok jenis khusus gaya arsitektur bangunan yang semakin memperkaya kejamakan arsitektural kawasan/lingkungan.
3. Kejamakan lingkungan (*value for environmental diversity*). Kemajemukan arsitektur memberi kontribusi bagi bertambahnya kemajemukan/keragaman wajah lingkungan.
4. Kejamakan fungsional (*value for functional diversity*). Kemajemukannya ditentukan oleh variasi dalam latar belakang

sejarah dan usia bangunan yang memungkinkan adanya berbagai fungsi campuran (*mixed use*).

5. Kelangkaan bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena hanya berjenis satu atau merupakan contoh terakhir yang masih ada sehingga termasuk karya yang unik dan sangat langka bahkan satu-satunya di dunia dan tidak dimiliki oleh pihak/tempat lain.
6. Peranan sejarah (*value for continuity of cultural memory/ heritage values*).
Bangunan atau lingkungan perkotaan atau bagian dari kota dilestarikan karena menjadi lokasi bagi berlangsungnya peristiwa bersejarah. Cagar budaya dinilai penting karena ada ikatan simbolis antara peristiwa sekarang dengan masa lalu atau ikatan emosional antara objek dengan masyarakat setempat.
7. Memperkuat citra kawasan di sekitarnya.
Bangunan atau bagian dari kota dilestarikan karena keberadaannya dapat memberikan makna lebih untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitar.
8. Nilai ekonomi dan komersial.
Bangunan atau kawasan dilestarikan karena memiliki nilai investasi di dalamnya sehingga mempengaruhi kawasan di sekitarnya.
9. Keistimewaan.
Bangunan-bangunan ruang dilindungi karena memiliki keistimewaan misalnya sebagai yang tertinggi, tertua, terpanjang, terbesar atau yang pertama terbangun.

Konservasi pada dasarnya tidak hanya mencakup tataran fisik tetapi juga ditujukan untuk melestarikan kegiatan budaya dan sosial yang berlangsung di dalamnya khususnya dalam menghadapi ancaman perubahan zaman.

Jenis Usaha & Pendekatan Konservasi

Terdapat beberapa usaha pelestarian cagar budaya, yaitu:

1. *konservasi*, yang merupakan segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi;
1. *preservasi* sebagai usaha pelestarian suatu tempat agar tetap persis dengan kondisi aslinya tanpa ada perubahan termasuk usaha mencegah penghancuran;
1. *restorasi/rehabilitasi* sebagai usaha mengembalikan suatu tempat ke kondisi semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru;
1. *rekonstruksi* sebagai usaha mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan kondisi semula dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru;
1. *adaptasi/revitalisasi* sebagai usaha mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai; dan
1. *demolisi* sebagai usaha penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau membahayakan (Sidharta & Budihardjo, 1989: 11).

Tabel 1.1 Jenis-jenis Kegiatan Pelestarian dan Tingkat Perubahannya

KEGIATAN	TINGKAT PERUBAHAN			
	Tidak Ada	Sedikit	Banyak	Total
Konservasi	√	√	√	√
Preservasi	√			
Restorasi/Rehabilitasi		√	√	
Rekonstruksi			√	√
Adaptasi/Revitalisasi		√		
Demolisi				√

(Sumber: Sidharta dan Budihardjo, 1989)

Sebagai bagian dari proses kebijakan pembangunan kota, konservasi harus dipersiapkan atau direncanakan secara matang sebelum akhirnya menentukan salah satu kebijakan konservasi. Setiap kebijakan konservasi yang dihasilkan maupun metode yang digunakan, sangat tergantung pada kasus yang dihadapi. Pada kasus pelestarian suatu cagar budaya yang rusak akibat faktor iklim, kebijakan yang lahir dapat berupa usaha restorasi/rehabilitasi. Namun, pada kasus-kasus tertentu yang telah bersentuhan langsung dengan faktor keamanan pengguna, kebijakan konservasi yang dilahirkan dapat bersifat radikal, yaitu dengan demolisi atau penghancuran total cagar budaya. Pada dasarnya, setiap perencanaan konservasi dapat menerapkan satu atau bahkan gabungan dari beberapa tipe pendekatan yang terdiri dari:

1. Pendekatan Planologi/Perencanaan.

Perencanaan konservasi cagar budaya atau artefak arkeologis suatu kawasan yang didahului oleh kegiatan penelitian secara mendalam terhadap objek (fisik dan non-fisik) dan melibatkan partisipasi lokal dalam setiap tahapan perencanaan.

2. Pendekatan Penelitian dan Arahkan Desain.

Melalui riset akan dihasilkan rekomendasi desain (*design guidelines*) yang paling tepat untuk menjembatani antara nilai-nilai budaya masa lampau dengan konteks kebutuhan kota masa kini.

3. Pendekatan Kebijakan Kota.

Pemerintah dapat memberikan kebijakan berupa pemberian penghargaan kepada setiap usaha pelestarian yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat berupa keringanan pajak, pemberian dana pemeliharaan atau berupa dukungan usaha bagi pemilik. Selain itu, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa denda dan pajak yang setinggi-tingginya kepada warga yang terbukti melanggar aturan membangun setempat melalui praktik modifikasi atau perombakan total terhadap cagar budaya sehingga terjadi degradasi kualitas lingkungan secara signifikan.

4. Pendekatan Komunitas.

Seluruh proses perencanaan konservasi berusaha untuk melibatkan masyarakat setempat (*people participatory*), mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pemeliharaan. Melibatkan warga lokal akan membentuk rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap cagar budaya yang kemudian mendorong tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, Eko, 1994, *Architectural Conservations in Bali*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Depari, C. Setyonugroho, G., 2013, *Penelitian: Transformasi Karakteristik Konfigurasi Struktur Ruang Kawasan Masjid Pathok Nagari Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur.
- Garnham, H.L., 1984, *Maintaining the Spirit of Place*, Arizona: PDA Publishers Corporation.
- Istikandar, M.S.B., 2004, "Tradisionalitas dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid", Universitas Kristen Petra: Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol.32, No.2, Desember 2004, hlm. 110-118.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Jakarta.
- Larkham, P.J., 1996, *Conservation and the City*, London: Routledge.
- Lam, Kok Sun, 2008, *An Introduction of Space Syntax, Research Symposium Compilation*, USA: Georgia Tech Atlanta.
- Hadanipour, A., 1996, *Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-spatial Process*, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Purbadi, Y.Djarot, 2008, *Proposal Disertasi: Tata Spasial Permukiman Tradisional Desa Kaenbaun di Pulau Timor*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Program Pascasarjana Fakultas Teknik

- Rapoport, A., 1977, *Human Aspects of Urban Form Towards A Man-Environment Approach to Urban Forms and Design*, London: Pergamon Press.
- Schultz, C.N., 1980, *Genius Loci: Towards A Phenomenology of Architecture*, New York: Rizzoli.
- Sidharta, Budihardjo, E., 1989, *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Internet: www.archinect.com, 2012, *Archipelagos: Ungers versus Rowe*.
- Internet: www.readwrite.com, 2012, *Sim City: Inside South Korea's \$35 Billion Plan to Build A City from Scratch*, Publikasi 31 Juli 2012.
- Internet: www.yonghaophotography.com, 2000, *CBD: Final Water-maked*.

**the city is to be understood here as
architecture ... the city is seen
as a gigantic man-made object,
work of engineering and architecture
that is large and complex and growing
over time**

Aldo Rossi

PENGARUH ISLAM TERHADAP RENCANA KOTA YOGYAKARTA

Catharina Dwi Astuti Depari

Abstrak

Sebagai bagian dari Jawa, perkembangan budaya Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh sejarah masyarakat Islam yang hadir di sini sejak abad ke-2 Masehi oleh para pedagang Arab dan Persia. Pergeseran budaya yang terjadi di Pulau Jawa sebagian besar diakibatkan oleh ambisi politik para penguasa kerajaan pada masa kejayaan kerajaan Islam mulai berdirinya sekitar pertengahan abad ke-15 M, menggeser kebudayaan budaya dan agama yang sudah telah terdapat sebelumnya.

BAB II

ARSITEKTUR KOTA YOGYAKARTA PERIODE ISLAM DAN KOLONIAL BELANDA

Catharina Dwi Astuti Depari
Gerarda Orbita Ida Cahyandari

PENGARUH ISLAM TERHADAP RENCANA KOTA YOGYAKARTA

Catharina Dwi Astuti Depari

Abstrak

Sebagai bagian dari Jawa, perkembangan budaya Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh sejarah masuknya ideologi Islam ke perairan Jawa sejak abad ke-8 M melalui peran para saudagar Arab dan Gujarat. Pergeseran budaya yang terjadi di Pulau Jawa sebagian besar dilatarbelakangi oleh ambisi politik para penguasa kerajaan pada masa itu. Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di sekitar pesisir pantai Jawa sejak abad ke-15 M, menggeser dominansi budaya dan ideologi Hindu-Buddha yang telah terlebih dahulu berkembang. Melalui rangkaian peristiwa penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta penyebaran ajaran oleh para Santri ataupun Ulama, Islam semakin memperlihatkan eksistensinya dalam menentukan arah perkembangan tata ruang kota-kota kerajaan Jawa. Secara khusus, arah perkembangan Islam di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh peristiwa penaklukan Kerajaan Majapahit oleh Kerajaan Demak yang akhirnya membentuk sebuah kerajaan baru yang disebut sebagai Mataram Islam. Pada abad ke-16, ibu kota Kerajaan Mataram Islam dipindahkan dari daerah Pajang ke Kotagede pada era pemerintahan Sultan Hadiwijaya dan kemudian dipindahkan ke Plered pada era pemerintahan Sultan Agung. Perpecahan yang terjadi di internal Kerajaan Mataram Islam antara Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Pakubuwono III mengakibatkan terbentuknya dua kerajaan baru, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Islam dalam hal ini tetap diakui sebagai agama masing-masing kerajaan, namun bagaimana Islam mempengaruhi arah perkembangan tata ruang masing-masing wilayah tentunya memiliki perbedaan. Tulisan ini akan memaparkan secara khusus bagaimana sejarah perkembangan Islam

dan pengaruhnya terhadap tata ruang Kota Yogyakarta berdasarkan hasil penelusuran sejarah yang bersumber dari berbagai pustaka.

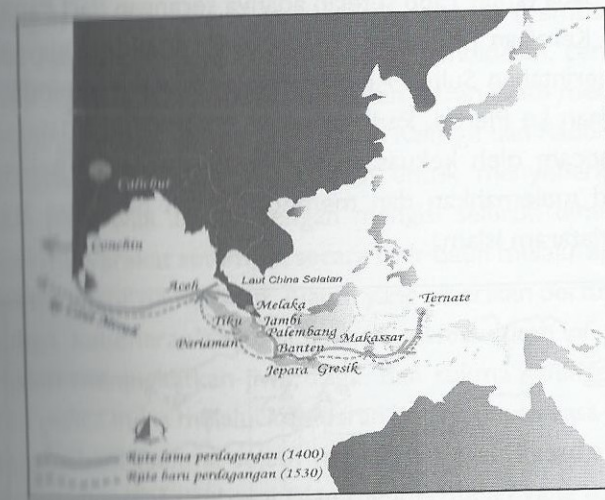
Sejarah Peradaban Sebelum Islam di Pulau Jawa

Sejak zaman Megalithikum, masyarakat Jawa hidup sebagai masyarakat agraris yang tetap sehingga hubungan antaranggotanya sangat kuat. Bagi masyarakat Jawa, tanah merupakan hak komunal yang bermakna religi kosmologi. Sistem irigasi diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 500-300 SM oleh Cina Selatan dan Vietnam sedangkan India masuk ke wilayah perairan Nusantara sejak abad ke-1 SM melalui hubungan perdagangan dan kelautan berdampingan dengan bangsa Cina (Zahnd, 2008:11-12). Kota-kota kerajaan Jawa pada dasarnya memiliki 2 tipologi, yaitu kerajaan pesisir dan kerajaan dalam. Kerajaan pesisir memiliki karakteristik, yaitu berkembang di kawasan perairan, memiliki pelabuhan, tidak memiliki *hinterland* (tanah rural) sehingga kekayaan lokal ditentukan dari hasil perdagangan dan masyarakat heterogen. Karakteristik masyarakat pesisir sangat terbuka terhadap budaya asing. Sedangkan karakteristik kerajaan dalam adalah umumnya berkembang di wilayah gunung berapi, memiliki lahan subur yang dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat setempat dan penduduk agraris dengan karakteristik cenderung tertutup dan homogen.

Pada abad ke-4 SM, wilayah Nusantara dikuasai oleh budaya Hindu Buddha melalui dominansi tiga kerajaan besar, yaitu: Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Mataram Hindu awalnya berpusat di daerah Dieng dan menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Tengah pada masa pemerintahan Raka Sanjaya. Namun, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan beraliran Buddha semakin kuat menguasai Selat Melaka-Sunda. Pada abad ke-8 dalam masa Dinasti Syailendra, Sriwijaya berhasil menakhlikkan Kerajaan Mataram Hindu. Pusat Kerajaan Mataram kemudian dipindahkan ke kawasan Borobudur hingga kemudian

terjadi pemberontakan oleh Rakai Pikatan yang merupakan keturunan Dinasti Sanjaya dan berhasil menghentikan kekuasaan Sriwijaya pada abad ke-9. Pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan dari Borobudur ke kawasan Prambanan (Zahnd, 2008:14-15).

Kemunduran perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-9 dan ke-10 sebenarnya dapat menjadi tonggak kebangkitan Kerajaan Mataram untuk tampil sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia. Namun, konflik perang berkepanjangan dengan Kerajaan Sriwijaya menghentikan ambisi tersebut. Kedua kerajaan tersebut akhirnya berahani di bawah pemerintahan Raja Airlangga pada tahun 1019 selama hampir 2 abad. Pada tahun 1293, lahirlah Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Wijaya dengan pengaruh kekuasaan yang sangat besar di seluruh wilayah Nusantara. Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (Zahnd, 2008:15).

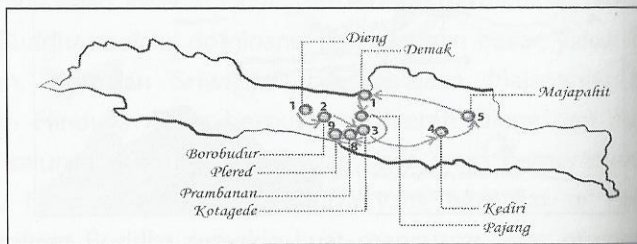


Gambar 2.1 Kronologi masuknya Islam ke wilayah perairan Indonesia dan Pulau Jawa

(Sumber gambar: Reid, 1996, digambar ulang oleh penulis, 2013)

Sejarah Islam di Pulau Jawa

Berdasarkan bukti sejarah inskripsi Arab, para pedagang Islam memasuki wilayah Asia Tenggara dan Samudera Hindia pada sekitar abad ke-8 M. Masuknya agama Islam diyakini semakin menambah kekuatan spiritual masyarakat Jawa dan mengakibatkan integrasi antara budaya Hindu Jawa dengan Islam. Islam mulai dapat menguasai kerajaan-kerajaan pesisir Jawa, yaitu pada sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16. Sejak tahun 1478, masyarakat Muslim Kerajaan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana berperang melawan Kerajaan Majapahit dan akhirnya Kerajaan Majapahit berhasil ditakhlukkan. Pusat kekuasaan Majapahit akhirnya pindah ke Jawa Tengah dan kemudian berdiri sebagai Kerajaan Mataram baru berideologi Islam. Sultan Hadiwijaya yang memerintah Kerajaan Mataram Islam memindahkan pusat kerajaan ke Pajang dan kemudian dipindahkan ke Kotagede pada tahun 1588 setelah adanya serangan dari Panembahan Senapati. Kerajaan Mataram mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Plered. Pada tahun 1677, Kerajaan Mataram Islam mulai terancam oleh kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda yang bermaksud melemahkan dan memecah belah penguasa tradisional Kerajaan Mataram Islam.



Gambar 2.2 Kronologi pemindahan pusat kerajaan-kerajaan Jawa sampai abad ke-17

(Sumber gambar: Zahnd digambar ulang oleh penulis, 2013)

Peninggalan sejarah tertua yang membuktikan masuknya ajaran Islam ke Pulau Jawa adalah makam seorang wanita Muslim di daerah Loran, Jawa Timur (Partokusumo, 1995: 286-287). Sebagaimana dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda bahwa pada era masa Kerajaan Majapahit di Jawa, masyarakat yang memeluk agama Islam masih relatif sedikit. Islam mulai berkembang terutama setelah masuknya seorang saudagar dari Gujarat (India) ke daerah Gresik pada era tahun 1419 sesudah Masehi dengan misi untuk menyiarkan ajaran Islam selain kegiatan berdagang sehingga dibangun sebuah pesantren pertama di daerah Gresik. Dalam sejarah penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa, Wali memiliki peran sentral. Khusus di Pulau Jawa, terdapat 9 wali yang perannya sangat dijunjung tinggi yang dikenal dengan sebutan Wali Sanga. Para Wali Sanga memiliki ambisi yang kuat untuk berdakwah di tengah persaingan politik yang terjadi antara Kerajaan Majapahit dengan sejumlah kerajaan di seluruh pelosok Nusantara dan di tengah konflik internal kerajaan. Setiap wali membagi wilayah bawah di seluruh Pulau Jawa melalui jalur pendidikan, cerita rakyat, seni, musik dan lakon wayang. Penyebaran ajaran Islam menggunakan media wayang di Jawa dirintis oleh Sunan Kalijaga dan Raden Patah.

Metode dakwah yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam oleh para wali adalah dengan mengisi seluruh dimensi hidup sehari-hari masyarakat setempat secara lahir batin melalui ajaran Islam yang adanya unsur pemaksaan. Ajaran yang diberikan bertujuan untuk menumbuhkan kebenaran sejati atau *kasunyataan (love of perfection)* dengan jalan meningkatkan jiwa, raga, dan sukma sehingga tercapai kesadaran panca indra melalui kesadaran hening (*cipta-rasa-karsa*) dan kesadaran pribadi (*sukma sejati*) menuju ke arah kesadaran rohani. Hal tersebut dipertaya sebagai jalan menuju Tuhan yang dalam istilah

(Partokusumo (Kebudayaan Jawa, 1995: 287), berasal dari istilah *salaf* yang berarti orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, kekasih Tuhan yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan manusia awam.

Jawa disebut *manunggaling kawula-Gusti*². Ajaran filsafat *kawula-Gusti* merupakan representasi atau simbol dari hubungan antara manusia dengan Tuhan yang di dalamnya mengandung konsep keseimbangan dan kesatuan antara manusia dengan Tuhan (Partokusumo, 1995: 297-298). Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam pada hakikatnya merupakan ajaran yang mengedepankan konsep damai dan berusaha untuk menghadirkannya dalam hubungan pergaulan antarumat termasuk dalam relasinya dengan Tuhan.

Sinkretisme Budaya Jawa-Islam

Istilah Islam berasal dari bahasa Arab yang secara tradisional dipahami oleh para Muslim sebagai agama yang benar dan satu-satunya berasal dari Tuhan yang diajarkan kepada manusia melalui para nabi yang dipercaya memegang sebuah kitab suci dengan Muhammad sebagai nabi terakhir dan terbesar yang memegang Kitab Qur'an. Sedangkan istilah Muslim memiliki konotasi sebagai pengikut agama Islam atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Islam dan agama Islam (Morris, 1994:369).

Dalam perkembangannya, Islam dikenal memiliki fleksibilitas dan tingkat keterbukaan/toleransi yang tinggi terhadap unsur-unsur kebudayaan lokal sehingga dalam perkembangannya terjadi proses akulturasi antara nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya setempat termasuk di pulau Jawa. Proses sinkretisme antara budaya Jawa dengan Islam berlangsung cepat yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (a) kemampuan agama Islam dalam menginterpretasikan lingkungan budaya secara baru tanpa menghilangkan identitas budaya lokal, dan

² *Manunggaling kawula-Gusti* merupakan ungkapan yang diajarkan oleh seorang Sufi Islam bernama Syekh Siti Jenar yang berarti bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah bersatu dengan Tuhannya atau bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia.

(b) kemampuan budaya Jawa dalam menyerap pengaruh baru dan mengintegrasikan elemen-elemen baru tersebut tanpa menghilangkan identitas Jawa.

Masyarakat Jawa pada dasarnya tidak sekadar berusaha memenuhi kebutuhan jasmaninya semata, tetapi juga berusaha memenuhi kebutuhan batinnya sehingga dibutuhkan keseimbangan di antara kedua aspek tersebut. Sifat masyarakat Jawa adalah seremonial dengan pandangan hidup yang melihat segala sesuatu sebagai satu keseluruhan yang bersifat sosial dan simbolis serta berusaha menyelaraskan segala sesuatu, perbedaan yang prinsipil antara subjek dengan objek, bentuk dengan isi, bentuk dengan waktu, simbol dengan tanda, dan antara hidup dengan mati, *kawula lan Gusti*, disederhanakan menjadi satu dan memiliki hubungan mitologis (Ronald, 1988:30-69). Masyarakat Jawa mengenal adanya mitos *jagad gedhe*, yaitu alam, dan *ragad cilik* sehingga dibutuhkan keselarasan antara alam (makrokosmos) sebagai roh alam yang suci pemberi kehidupan dengan manusia yang harus senantiasa berterima kasih kepada alam dengan memberikan bentuk sesaji atau persembahan kepada roh yang dipersonifikasikan ke dalam bentuk dewa dewi (Supriyono dalam Setiadi, 2010: 44-45).

Kepercayaan yang dianut mengakibatkan masyarakat Jawa selalu berpedoman pada satu prinsip ketika membangun yang disebut *manayu hayuning bawana*; artinya, selalu menjaga keselarasan dengan alam sekitar dan pelestarian nilai budaya lokal. Pikiran manusia Jawa selalu terkait dengan dunia gaib sebagai sesuatu yang lebih besar dari eksistensinya sehingga keberadaan Gunung Merapi, Laut Selatan, Sungai Pngan, Sungai Opak, Sungai Oyo, pohon beringin, pohon kemuning, makam, bahkan benda pusaka, seperti halnya keris, memiliki peranan penting dalam alam pikiran. Hal tersebut dapat dipahami mengingat besarnya pengaruh budaya Hindu dari India yang memiliki kepercayaan bahwa alam terbagi menjadi dunia atas dan dunia bawah, serta berbagai kepercayaan lainnya yang tumbuh sebelum masuknya budaya

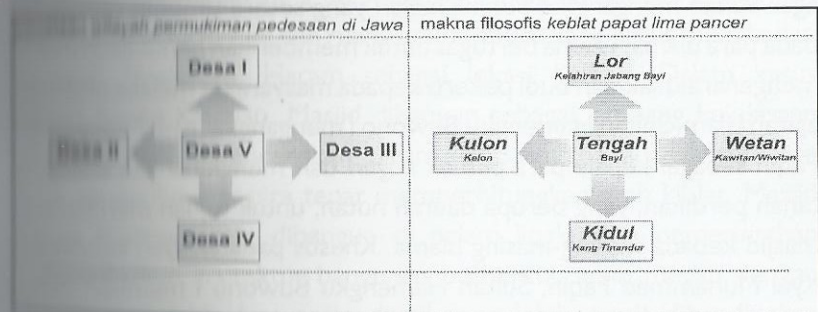
Islam. Kepercayaan tersebut diungkapkan dalam perilaku sehari-hari ataupun dalam kegiatan ritual setempat yang masih berlangsung hingga sekarang. Misalnya, penghormatan terhadap roh para leluhur yang dilakukan pada hari tertentu dengan mengunjungi makam para leluhur atau makam raja pada bulan Ruwah yang dikenal sebagai *nyadran*.

Islam dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Sebagaimana umumnya Kerajaan Islam di Jawa, penguasa Kerajaan Mataram menjadikan agama Islam sebagai agama negara dan kemudian mengalami perpecahan akibat pertikaian antara Pangeran Mangkubumi yang ingin mempertahankan tradisi kerajaan dengan Sunan Pakubuwana III yang mewakili kelompok Pangeran Sambernyawo yang memberontak. Untuk meredam konflik, Pemerintah VOC yang berkuasa berusaha untuk menyelesaikan pertikaian melalui Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam secara *de facto* dan *de iure*. Kesepakatan yang terjadi adalah pembagian wilayah Mataram Islam menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah Timur Kali Opak dikuasai oleh Sunan Pakubuwana III sebagai pewaris takhta Mataram dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Surakarta serta wilayah di sebelah Barat (daerah Mataram asli) dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono I dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta.

Setelah diangkat sebagai pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta, Sultan HB I mulai melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahannya, antara lain mengangkat para pejabat pemerintahan, pembangunan kraton termasuk beberapa elemen penting kota lainnya. Di dalam kompleks kraton, terdapat sejumlah bangunan, gerbang, ruang terbuka dan pohon yang mengandung makna simbolis. Hierarki ruang dalam tatanan Kota Yogyakarta secara kosmologi (*cosmic order*) menempatkan Kraton sebagai titik pusat kota yang kemudian

menentukan perkembangan kota selanjutnya. Hubungan antara Kraton, Laut Kidul, panggung krapyak, Tugu, dan Gunung Merapi yang membentuk aksis Utara Selatan, diadopsi dari konsep budaya Hindu tentang jagad purnawama yang memiliki titik pusat pada sebuah pulau bundar Jambudwipa yang dikelilingi oleh tujuh lapis daratan dan samudera. Pada dasarnya, aksis Kota Yogyakarta yang dimulai dari arah Selatan ke Utara memiliki makna filosofis, yaitu tempat asal mula roh sampai ke tempat bersatunya manusia dengan Tuhan. Selain itu, aksis dari Tugu sampai Alun-alun memiliki makna: **(a)** pangurakan sebagai jalan di mana nafsu hewani harus dibuang sebagai prasyarat untuk mencapai manunggaling kawula lan Gusti; **(b)** margomulyo sebagai jalan menuju kemuliaan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam rangka keselamatan dunia atau mangayu hayuning buwana ; **(c)** malioboro sebagai jalan yang menjelaskan maksud Tuhan dalam menciptakan dunia; dan **(d)** margotomo sebagai jalan menuju keutamaan, asal usul manusia atau sangkan paraning dumadi (Setiadi, 2010: 51-52).



Gambar 3.1 Penerapan konsep *Mancapat* dalam penataan permukiman Jawa (sumber skema: Rejeki (2010) diskema ulang oleh penulis, 2013)

Dalam menata ruang kota atau kerajaan, Sultan Hamengku Buwono I menentukan batas wilayah dengan menggunakan konsep *keblat papat lima pancer*. Karakteristik penataan wilayah Kasultanan

Ngayogyakarta yang berkonsep *keblat papat lima pancer* adalah bersifat khas dan tidak ditemukan pada penataan ruang wilayah Kasultanan Surakarta. Konsep *keblat papat lima pancer* dimanifestasikan ke dalam bentuk masjid yang diletakkan di empat penjuru utama mata angin dan berfungsi sebagai *pathok*³ atau penanda batas wilayah ibu kota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setiap masjid yang menjadi penanda batas wilayah kasultanan di empat penjuru mata angin disebut pula dengan istilah *pathok nagari*. Sedangkan istilah *Masjid Kagungan Dalem Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat* pada setiap masjid menunjukkan peran sentral sultan dalam sejarah Islam dan pembangunan masjid (Depari, 2013:70-72).

Sejarah pembangunan masjid *pathok nagari* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh seorang pemuka agama bernama Kyai Muhammad Faqih yang memberikan nasihat kepada Sultan Hamengku Buwono I. Sultan memiliki harapan agar wilayah Kasultanan Ngayogyakarta berada dalam keadaan aman sehingga Kyai Muhammad Faqih memberikan nasihat agar Sultan mengangkat *pathok nagari* yang secara simbolis mengarah pada para ulama. Ulama bertugas untuk memberikan pendidikan moral mengenai akhlak dan budi pekerti kepada masyarakat melalui nilai-nilai ajaran Islam. Sultan Hamengku Buwono I mengangkat Kyai Muhammad Faqih sebagai kepala para *pathok nagari* dan menghibahkan sebidang tanah perdikan, yang berupa daerah hutan, untuk tujuan membangun masjid kepada masing-masing ulama. Khusus pada wilayah kekuasaan Kyai Muhammad Faqih, Sultan Hamengku Buwono I memberi nama *Wa Anna Karoma* yang kemudian dilafalkan dalam bahasa setempat menjadi Wonokromo dengan tujuan agar keberadaan masjid dapat memberikan kemuliaan bagi masyarakat setempat.

Terdapat lima *Masjid Pathok Nagari* yang tersebar di empat penjuru mata angin wilayah Kasultanan Ngayogyakarta dengan Masjid

³ *Pathok* dalam bahasa dan dialek Jawa memiliki makna yang sama dengan istilah "patok" dalam Bahasa Indonesia, yaitu tonggak penanda tapal batas.

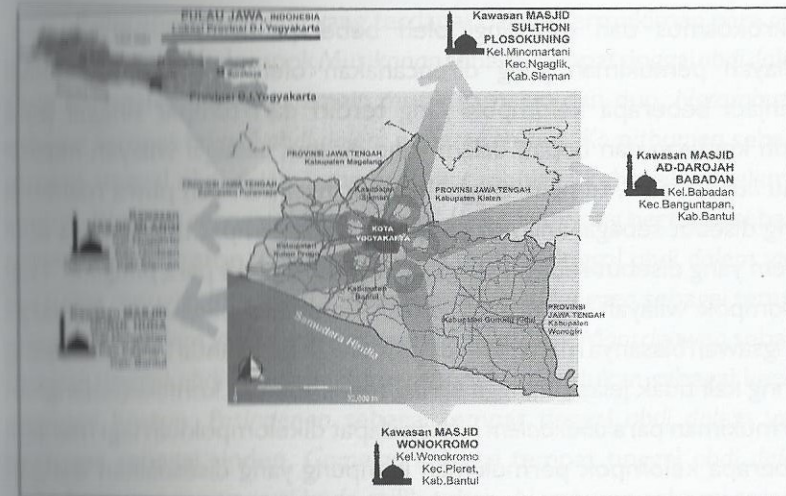
Masjid Agung Kauman sebagai titik pusat wilayah kasultanan berdasarkan konsep mancapat. Kelima Masjid tersebut adalah Masjid Mlangi di bagian Barat Yogyakarta, Masjid Babadan di bagian Timur, Masjid Hadiningrat di bagian Utara, serta Masjid Nurul Huda Dongkelan dan Masjid Wonokromo di bagian Selatan Yogyakarta (Depari, 2013: 71). Selain berfungsi sebagai penunjuk batas wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta, *Masjid Pathok Nagari* memiliki peran simbolis sebagai lambang pertahanan yang menjaga kemurnian moral masyarakat Islam di seluruh penjuru wilayah kasultanan. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan ajaran Islam, menjalankan kegiatan ibadah, menjalankan kegiatan belajar (mengaji) dan sebagai sarana untuk melangsungkan upacara pernikahan dan kematian. Kelima Masjid menjalankan fungsi ketakmiran berdampingan dengan Masjid Agung Kauman yang merupakan masjid utama kasultanan. Meskipun bentuk bangunan masjid dapat berubah dan berbeda sesuai dengan konteks lingkungannya masing-masing, terdapat beberapa ketentuan pembangunan masjid yang tidak dapat diubah, antara lain penentuan arah kiblat dinding masjid dan ruang utama sholat yang harus menghadap ke arah Masjid Al' Haram sebagai lokasi Ka'bah. Dalam kasus Masjid Agung Kauman, Masjid dibangun sebagai lambang kekuasaan kasultanan dan direncanakan dalam keadaan apa adanya sehingga tidak sepenuhnya secara tepat memperhitungkan arah kiblat. Masjid Agung Kauman yang dibangun di dalam lingkungan pemerintahan mengakibatkan arsitektur bangunan berbentuk lebih megah dengan ukuran yang lebih luas serta detail yang lebih rumit dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya yang berkembang di seluruh penjuru wilayah kasultanan (Rochym, 1987:61-73). Masjid Agung Kauman tidak sekadar berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan kaum Muslimin kampung, namun juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dalam skala wilayah kasultananan Yogyakarta sekaligus sebagai masjid utama kraton. Mengingat bahwa karakteristik dari agama Islam

yang toleran atau terbuka terhadap adat kebiasaan setempat, desain elemen bangunan masjid turut menyesuaikan dengan ragam desain/corak Yogyakarta yang mempresentasikan simbol-simbol ornamen Jawa dan Kraton.

Selain masjid sebagai elemen simbolis kawasan Islam, kawasan *Masjid Pathok Nagari* Yogyakarta dibentuk pula oleh elemen lainnya sebagai pembentuk identitas kawasan, seperti pondok pesantren dan madrasah, tempat tinggal pemuka agama dan pengelola masjid, area makam dan wilayah permukiman warga yang mayoritas menganut agama Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Dalam tataran kawasan, masjid berperan sebagai generator atau sub-ordinat yang menentukan arah perkembangan kawasan selanjutnya dengan karakteristik fisiknya masing-masing. Dalam aspek sosial politik, khususnya yang berkaitan dengan struktur organisasi kepengurusan masjid, para Imam atau Pengulu atau Kyai Pengulu di masing-masing kawasan masjid memiliki kedudukan sebagai anggota al-Mahkamah al-Kabirah, yaitu suatu Badan Peradilan Kesultanan Yogyakarta dalam tingkat Peradilan Agama Islam. Imam Besar Masjid Agung Kauman memiliki jabatan sebagai Ketua Mahkamah dengan gelar Kanjeng Kyai Pengulu dengan Sultan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan peradilan.

Kosmologi Jawa dalam Tata Ruang Kota Yogyakarta

Tradisi bermukim masyarakat Jawa sangat erat kaitannya dengan proses dan pengertian tradisional tentang bermukim urban dalam konteks nagara (Wiryomartono, 1995:24). Mustahil dapat dipahami konsep penataan ruang kota Jawa jika tidak diketahui sebelumnya mengenai pola pikir dan budaya masyarakat Jawa. Dalam sistem kemasyarakatan Jawa dikenal pola hierarki yang terdiri dari kelompok petani, pedagang, priyayi dengan Raja sebagai pusat kekuasaan. Penataan ruang bermukim kota-kota Jawa termasuk Yogyakarta, senantiasa



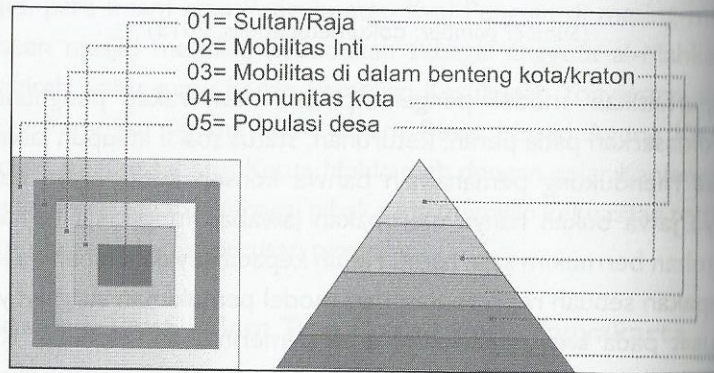
Gambar 2.3 Sebaran lokasi Masjid *Pathok Nagari* di keempat penjuru mata angin Kota Yogyakarta

(Sumber gambar: dokumen penulis, 2013)

memperhatikan model pengelompokan masyarakat penghuninya yang didasarkan pada peran, keturunan, status sosial ataupun jabatan. Hal ini mendukung pemahaman bahwa konsep kuta-negara dalam budaya Jawa bukan hanya merupakan jawaban fungsional terhadap kebutuhan bermukim saja, namun lebih kepada keyakinan bahwa kota merupakan sebuah representasi dari model pemukiman surgawi yang berpusat pada area dalem atau area pemerintahan. Menurut Kitab *Negarakertagama* dan *Pararaton*, Kerajaan Kertanegara pada masa pemerintahan Raja Singasari (1268-1292) merupakan peletak pertama dari pondasi pemerintahan kerajaan Jawa, mulai dari Kerajaan Majapahit sampai dengan Kerajaan Mataram Islam. Raja dibantu oleh mahapatih, menteri dan penasihat ahli termasuk para adipati, tumenggung dan demang atau kepala desa.

Secara konsentrik, kraton dibangun sebagai inti atau pusat kota yang merepresentasikan kehadiran Tuhan dalam sebuah struktur

mikrokosmos dan dikelilingi oleh beberapa wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang direncanakan oleh Sultan HB I dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari tempat tinggal para patih kerajaan dan bupati dalam yang disebut sebagai wilayah *nayaka* atau *bupati njero*, tempat tinggal kaum bangsawan dan putra mahkota yang disebut sebagai wilayah kadipaten serta tempat tinggal para *abdi dalem* yang disebut sebagai *pangulon* atau kompleks para *pangula*. Tiap kelompok wilayah memiliki sejumlah kompleks bangunan. Keluarga bangsawan biasanya memiliki *ndalem*⁴ dengan batas antarkompleks yang sering kali tidak jelas sehingga sering menimbulkan konflik. Sedangkan permukiman para *abdi dalem* kraton dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok permukiman kampung yang disesuaikan dengan profesi, status sosial dan jabatannya dalam hubungan birokrasi dengan kraton.



Skema 2.2 Orientasi dan tata letak kota-kota di Jawa berdasarkan pola konsentrik.

(Sumber skema: Tjahjono dalam Setyowati-2007, diskema ulang oleh penulis 2013)

⁴ *Ndalem* dibangun di atas lahan kosong yang tersebar di daerah luar ataupun di daerah dalam benteng kraton. Selain sebagai tempat tinggal *pangeran* atau *sentana ndalem* digunakan sebagai hunian oleh masyarakat (*kawula alit*) yang hendak mengabdikan pada Sultan sebagai *abdi dalem*.

Kelompok kampung yang terdapat dalam permukiman para *abdi dalem* antara lain kelompok *Musikanan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang berprofesi sebagai pemain musik gamelan dan tiup, *Ngrambutan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* penata rambut, *Kemitbumen* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas menjaga kebersihan halaman kraton, *Budiran* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas sebagai tukang sulam kraton, *Gebulen* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas menyiapkan api untuk memasak, *Sekullanggen* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas menyiapkan nasi, *Mantrigawen* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang mempunyai kedudukan sebagai kepala tukang kraton, *Pesindenan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas sebagai sinden, *Gamelan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas mengurus kuda milik sultan, *Namburan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas menabuh tambur atau genderang, *Wani* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas mengurus dapur kraton, *Patehan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas menyiapkan minuman, *Rotowijayan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas membuat kereta kraton, *Suranatan* sebagai tempat tinggal *abdi dalem* yang bertugas sebagai ulama kraton dan kampung *Hamman* yang merupakan suatu kelompok permukiman warga yang memiliki jabatan dalam mengurus bidang keagamaan di tingkat kraton dan kerajaan (Chawari, 2008: 42-43).

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sejarah perkembangan Islam serta pengaruhnya terhadap tata ruang Kota Yogyakarta, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Sebagai penguasa kerajaan, sultan berusaha menjaga hubungan dengan rakyat sebagai sesuatu yang senantiasa berada di dalam keseimbangan. Hubungan yang selaras antara rakyat dengan sultan akan mengantarkan rakyat dekat dengan Tuhan sehingga pengabdian

kepada sultan sebagai penguasa kraton diwujudkan melalui komunitas *abdi dalem*.

Pola struktur ruang Kota Yogyakarta senantiasa berorientasi pada konsep Kosmologi Mancapat sebagai warisan budaya Jawa Hindu-Kuno. Islam berintegrasi dengan konsep tata ruang Kota Yogyakarta melalui kehadiran elemen-elemen kota yang terdiri dari satu masjid utama sebagai pusat dan lima masjid lainnya sebagai patok batas kota yang tersebar di empat penjuru mata angin.

Masjid Agung berperan sebagai sentra penyebaran Islam dan sekaligus sebagai pusat kosmis yang menyimbolkan kehidupan spiritual masyarakat Yogyakarta, sedangkan kraton dan alun-alun menyimbolkan kekuatan politik dan ritual masyarakat Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Chawari, M., 2008, Tesis: *Bangunan Rumah Tradisional Jawa di Kampung Kauman Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Program Studi Arkeologi Program Pascasarjana.
- Depari, C. Setyonugroho, G., 2013, *Penelitian: Transformasi Karakteristik Konfigurasi Struktur Ruang Kawasan Masjid Pathok Nagan Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur.
- Morris, A.E.J., 1994, *History of Urban Form Before The Industrial Revolutions*, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Partokusumo, K.K., 1995, *Kebudayaan Jawa: Perpaduannya dengan Islam*, D.I. Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia
- Reid, A., 1996, *Indonesian Heritage: Early Modern History*, Jakarta: Grolier International, Inc.
- Rejeki, V.G.Sri, Soewarno N., Sudaryono, Subroto, T.Y.W.S., 2010, *Nilai Kosmologi pada Tata Spasial Permukiman Desa Kapencan Lereng Gunung Sindoro*, Wonosobo, Yogyakarta: Universitas
- Gadjah Mada, Fakultas Teknik, Forum Teknik, *Majalah Ilmiah Teknologi*, hlm.140-148.
- Rahmadi, A., 1987, *Masjid dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Rahmadi, Arya, 1988, *Manusia dan Rumah Jawa*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan.
- Selendi, A., 2010, *Arsitektur Kampung Tradisional*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyanto, E., 2007, *Karakteristik Ruang Kawasan Dalam Beteng Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta, UGM: Forum Teknik Volume 30, No. 3, hlm.197-272.
- Suyamartono, A.B., 1995, *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Talib, H., 2008, *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Internet: www.Masuk-Islam.com., 2013, *Antara Wayang Hindu dengan Wayang Islam, Bagaimanakah Pandangan Islam tentang Wayang?*, Publikasi: 19 Maret 2013.
- Internet: www.Masuk-Islam.com., 2010, *Yogyakarta: Istimewa Sepanjang Masa*, Publikasi: 18 Desember 2010.

HTOD: Oldobj: m:22y: Tasikmalaya: Indonesia: City before and
independent, Netherlands Institute For War Document
Penarik Ontak
Suharta, Yonita, 1995, Arsitektur Kolonial Belanda di Kota
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Suzantiwati, Abdurrahman, 2009, Kota Yogyakarta 1500-1900
Jagadh Persehbinger, Jogyakarta, Yayasan
Indonesia
Surya, D., 2005, Peradik dan Perkembangan Kota Yogyakarta
1500, Ed. Freck Colem D.J.
Tahdon, Sunaran, 1999, Indonesia Heritage Architecture, Yogyakarta
Pustaka
Wijanto, 2007, Sawang Tempo Dulu, Yogyakarta, Pustaka
Ontak

...dengan upaya konservasi terhadap identitas Kota
... sebagai tempat beradanya berbagai unsur budaya
... dari zaman dan Kolonial Belanda... dibutuhkan rencana
... mengenai berbagai penelitian, kajian, studi penelitian
... yang dilakukan diarahkan pada kawasan
... Kota Yogyakarta yang dianggap mempunyai nilai
... dan kawasan-kawasan yang akan dilindungi
... dari pengaruh negatif dari pengaruh perkembangan ideologi
... terhadap Kota Yogyakarta, namun harus berfokus
... dalam mewujudkan arah perkembangan Kota

... Kota Yogyakarta menjadi latar belakang sejarah
... dengan kota-kota lain di Asia Tenggara...
... sebagai pusat...
... yang...
... yang...

BAB III

KASUS-KASUS KONSERVASI ARSITEKTUR

Augustinus Madyana Putera
Catharina Dwi Astuti Depari
Amos Setiadi
Vincentia Reni Vita Surya
Yanuaris Benny Kristiawan

TRANSFORMASI POLA STRUKTUR RUANG KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA

Catharina Dwi Astuti Depari

Abstrak

Sebagai sentra penyebaran ajaran Islam di Yogyakarta, Kampung Kauman telah ditempa oleh serangkaian peristiwa politik dan sosial budaya yang cukup kompleks. Masa terbentuknya Kampung Kauman belum dapat diketahui secara pasti, namun perkembangan Kampung Kauman diyakini memiliki kaitan yang sangat erat dengan sejarah lahirnya Kasultanan Ngayogyakarta. Pasca ditandatanganinya Perjanjian Hyanti pada tahun 1755 M, Sultan Hamengku Buwono (HB) I sebagai penguasa kasultanan saat itu merencanakan penataan ruang wilayah kasultanan yang didasarkan pada konsep kosmologi Jawa yang turut mempengaruhi perkembangan Kampung Kauman. Hubungan birokrasi yang erat antara Kampung Kauman dengan kraton dibuktikan melalui kebijakan Sultan HB I yang mengukuhkan peran para santri (warga Kauman) sebagai abdi dalem kraton, yang secara khusus bertugas untuk mengurus bidang keagamaan di wilayah Kasultanan. Lahan peradilan di sekitar kraton dihibahkan oleh Sultan HB I kepada warga Kauman untuk digunakan sebagai wilayah hunian. Sebagai kampung Islam, ajaran Islam telah menyatu dengan rutinitas hidup sehari-hari warga Kampung Kauman. Namun, kuatnya desakan globalisasi dapat mengancam kelangsungan identitas kampung. Pada dasarnya, derajat perubahan yang terjadi pada fisik Kampung Kauman cenderung minim apabila dibandingkan dengan perubahan yang terjadi pada kawasan bersejarah lainnya di Kota Yogyakarta. Hal ini diakibatkan karena pola pikir dan budaya masyarakat Kauman yang cenderung bersifat tertutup dan tetap mempertahankan hubungan pertalian darah di dalam komunitas setempat. Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian

terhadap perubahan fisik kampung yang mulai terjadi termasuk berbagai fenomena politik, ekonomi dan sosial budaya yang mempengaruhi sehingga diharapkan pemahaman mendalam mengenai Kampung Kauman Yogyakarta akan dapat tercapai.

Dualisme Budaya pada Kota-kota Tradisional

Permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota tradisional umumnya diakibatkan oleh besarnya desakan globalisasi yang masuk dan kemudian berpotensi mengancam kelestarian budaya setempat. Pada kota-kota tradisional, desakan globalisasi mendorong pula lahirnya fenomena dualisme¹ budaya, yaitu pertentangan antara paham modern dengan paham tradisional. Akibat dari dualisme budaya adalah lahirnya situasi dilematis yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota ketika akan menentukan arah kebijakan kotanya, yaitu antara pilihan untuk mengeksploitasi lahan kota demi meraup investasi dengan pilihan untuk melestarikan aset-aset ekonomi kota yang sekaligus bernilai sejarah (Larkham, 1996: 3). Secara fisik, dualisme budaya dapat diamati dari pola bentuk kawasan yang terkesan ambigu dan saling terpecah belah (*ambiguous-fragmented urban forms*) dan ditandai pula oleh punahnya elemen identitas lokal karena tersingkir oleh struktur bangunan modern. Menghadapi permasalahan tersebut, dibutuhkan usaha pelestarian terhadap aset-aset kota yang dinilai mengandung makna sejarah dengan didukung oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Sebagai salah satu kota tradisional di Pulau Jawa, Yogyakarta memiliki sejumlah cagar budaya, di antaranya adalah Kampung Kauman yang tumbuh sebagai sentra penyebaran ajaran Islam. Sejarah lahirnya

¹ *Dualisme*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 (2012), berarti paham bahwa di dalam kehidupan terdapat dua prinsip yang saling bertentangan. Dalam konteks budaya, berarti adanya pertentangan antara paham modern dengan paham tradisional.

Kampung Kauman tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta. Sebagai sebuah kerajaan baru hasil pemisahan dari Kerajaan Mataram Islam, Kasultanan Ngayogyakarta membutuhkan sejumlah perangkat sosial yang antara lain menangani persoalan agama di lingkungan kraton. Sultan Hamengku Buwono I sebagai pimpinan kraton menetapkan suatu wilayah di sekitar kraton sebagai daerah permukiman bagi para santri/pemuka agama dan ditetapkan sebagai daerah berstatus perdikan.² Masing-masing abdi dalam memperoleh sebidang lahan pada daerah perdikan untuk membangun sebuah fasilitas hunian.

Tulisan dikembangkan dari sebuah kajian terhadap gejala perubahan yang terjadi pada fisik ruang Kampung Kauman. Seiring dengan semakin terbukanya sikap masyarakat Kauman terhadap modernisasi dan para pendatang, gejala perubahan yang terjadi pada fisik kampung semakin jelas terlihat. Lokasi kampung, yang berada di pusat Kota Ngayogyakarta, semakin memperbesar potensi perubahan yang terjadi. Riset mengenai karakteristik Kampung Kauman Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan metodologi rasionalistik dengan terlebih dahulu mempersiapkan *grand theory* mengenai jenis-jenis pola bentuk ruang dan identitas kota.

Pola Bentuk dan Identitas Kota

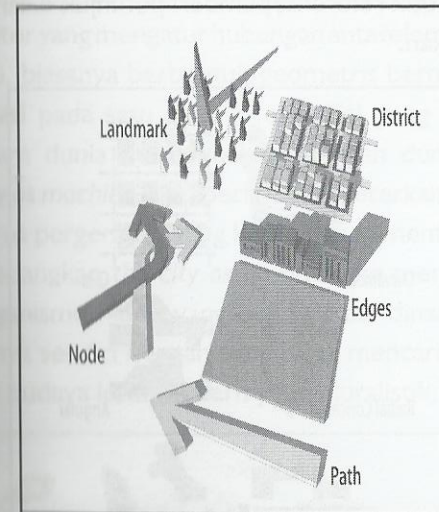
Tujuan Arsitektur adalah menciptakan tempat penuh makna sehingga manusia memiliki kemampuan untuk memahami keberadaannya terhadap lingkungan sekitar (Schultz, 1980: 5). Demi meraih tujuan tersebut, setiap tempat dirancang dengan mempertimbangkan nilai atau karakteristiknya sehingga dapat dibedakan dengan tempat lain. Desain tempat dengan karakteristik individualnya yang kuat

² *Perdikan* adalah status istimewa yang diberikan kepada suatu daerah dengan menerapkan kebijakan bebas bayar pajak oleh warganya namun dengan syarat menyetor sejumlah kewajiban atau tugas tertentu.

sebagai simbol ekspresi budayanya, adalah dambaan pribadi setiap komunitas. Tanpanya hidup manusia menjadi tidak bermakna, kebanggaan terhadap kota menjadi punah dan sebagai gantinya adalah perasaan yang semakin terasing dengan lingkungan sekitar. Selain pertimbangan karakter, desain setiap tempat seyogianya juga harus dapat mengakomodasi perubahan sehingga tugas arsitek masa kini adalah bagaimana ide perubahan tersebut dapat diwadahi, namun karakteristik tempat tetap dapat dipertahankan (Garnham, 1984:4).

Dalam bidang ilmu arsitektur, bahasa yang digunakan adalah bahasa pola dan bentuk. Tidak berbeda dengan arsitektur dalam skala lingkungan mikro/bangunan, arsitektur dalam skala mezo (kawasan) dan makro (kota) turut menggunakan bahasa pola dan bentuk sebagai media interpretasi terhadap karakteristik kota dan kawasan yang dikaji. Pola bentuk suatu tempat, kawasan atau kota dihasilkan dari rangkaian penataan atau penyusunan dari berbagai jenis elemen. Elemen-elemen tersebut berperan untuk memberikan petunjuk simbolik bagi orang mengenai karakteristik sang tempat. Sebagai contoh, orang menyadari keberadaannya di Kota Yogyakarta setelah mengamati adanya Gunung Merapi atau Pantai Parangtritis sebagai elemen alamiah Yogyakarta yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain, atau setelah mengamati adanya Tugu Pal Putih sebagai simbol Kota Yogyakarta ataupun Kraton Yogyakarta sebagai elemen buatan manusia yang berciri khas. Pada kasus tertentu, elemen alamiah dapat bertindak sebagai unsur utama untuk mewujudkan suatu tatanan ruang kota yang didasarkan pada suatu keyakinan atau konsep-konsep mitologis tertentu. Pentingnya menjaga keharmonisan alam semesta dimanifestasikan melalui penataan berbagai jenis elemen kota yang saling terhubung, yaitu antara bumi dengan langit, antara dunia mikrokosmos dengan makrokosmos, antara lingkungan buatan manusia dengan dunia surgawi (Schultz, 1980: 4). Dalam membangun dunia mikrokosmos, manusia menyadari adanya kekuatan magis yang mempengaruhi dan menuntun tindakannya

sehingga akhirnya dapat terwujud sebuah tatanan ruang yang taat terhadap suatu artikulasi formal tertentu (Schultz, 1980: 50-51). Beberapa elemen lain yang memberikan keunikan pada tempat, yaitu gaya arsitektur, iklim, setting unik alami lingkungan, metafora, material lokal, produk kerajinan, bangunan penting lokal, keanekaragaman budaya, nilai-nilai kemasyarakatan, area publik serta aktivitas lokal (Garnham, 1984: 4).

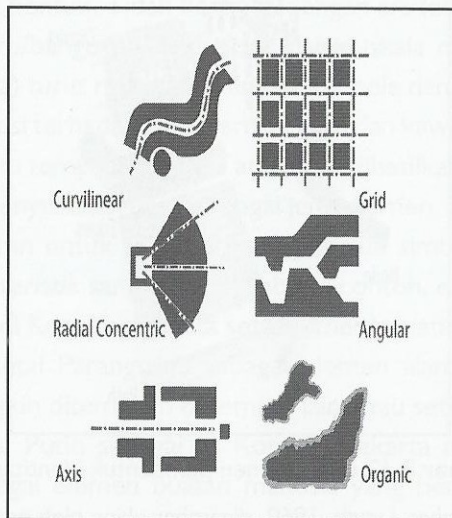


Gambar 3.12 Lima elemen pembentuk identitas kota

(Sumber gambar: Lynch, 1960, digambar ulang oleh penulis, 2013)

Menurut Lynch (1960), terdapat lima jenis elemen kota yang membentuk identitasnya, yaitu: (a) *pathways*, sebagai sebuah jaringan jalan yang menjadi saluran bagi rute pergerakan para penghuninya; (b) *edges*, sebagai elemen linear kota yang menandakan batas antara blok-blok, garis lurus yang memecah dalam suatu kontinuitas, batas pembangunan atau dinding kota; (c) *districts*, sebagai komponen organisasi permukiman dari suatu kota berskala medium sampai

skala besar, biasanya memiliki kesamaan yang mudah dikenali sehingga memperlihatkan adanya identitas/karakter tertentu; (d) *nodes*, sebagai titik atau area strategis yang menjadi gerbang masuk kota, berperan sebagai pusat kota, fokus atau epitome yang mempengaruhi bentuk sekitar atau area berdirinya simbol-simbol kota; dan (e) *landmarks* sebagai sebuah objek fisik di dalam atau di sekitar kota, baik berupa bangunan, tata tanda, toko maupun fitur alam, seperti gunung atau lautan, berperan sebagai titik referensi/pemberi petunjuk dalam menentukan orientasi pergerakan.

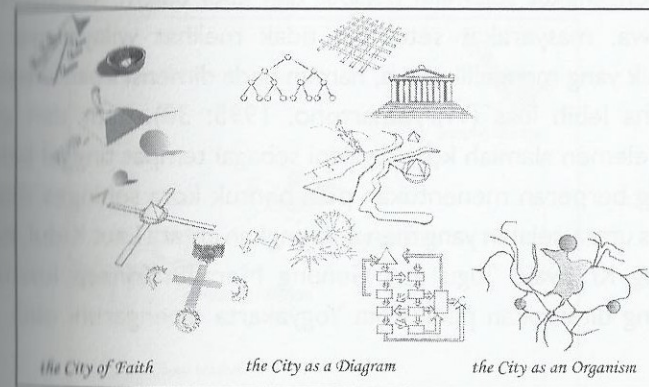


Gambar 3.13 Jenis-jenis bentuk ruang kawasan/kota menurut teori *figure ground*

(Sumber gambar: Trancik, 1986, digambar ulang oleh penulis, 2013)

Seluruh elemen disusun sebagai suatu sistem yang saling berhubungan sehingga menghasilkan suatu pola bentuk tertentu. Setiap pola bentuk yang dihasilkan merupakan ekspresi dari budaya penghuninya. Hal tersebut berarti bahwa setiap pola bentuk yang

tercipta dipengaruhi oleh sejumlah faktor (*determinants*), antara lain identitas/ritual setempat atau proses budaya yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk memahami pola bentuk ruang suatu kota, Trancik (1986) menghasilkan tiga teori desain kota, yaitu *figure ground theory*, *linkage theory*, dan *place theory*. Sebelum Trancik, Lynch (1981), sebelumnya telah terlebih dahulu menguraikan tiga model bentuk kota, yaitu *the city of faith*, *the city as a machine*, dan *the city as an organism* (Lynch dalam Shane, 2005: 38-51). Dalam *the city of faith*, aturan magis merupakan faktor yang mengatur hubungan antarelemen kota. Pola kota *the city of faith*, biasanya berbentuk geometris bermakna kosmologis dan berorientasi pada satu garis lurus (*axis*) yang mengekspresikan hubungan antara dunia makrokosmos dengan dunia mikrokosmos. Konsep *the city as machine* memperlihatkan keterkaitan antara koridor kota dengan arus pergerakan yang kemudian menentukan bentuk kota selanjutnya. Sedangkan *the city as an organism* menganalogikan kota selayaknya organisme hidup yang berkarakter dinamis dan berusaha mengatur dirinya sendiri dengan senantiasa mencari keseimbangan di tengah-tengah budaya kota modern yang pluralistik.



Gambar 3.14 Konsep tiga model bentuk kota
(Sumber gambar: Lynch dalam Shane, 2005, digambar ulang oleh penulis, 2013)

Sejarah Perkembangan Islam di Yogyakarta

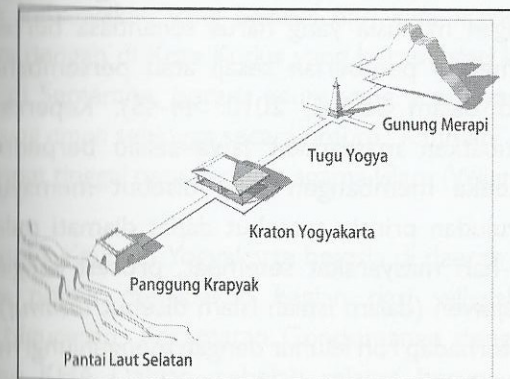
Sejarah perkembangan kota-kota Islam di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi Islam-Arab yang dibawa oleh para pedagang dari Persia dan Gujarat sejak abad ke-8. Masuknya Islam semakin menambah kekuatan spiritual masyarakat Jawa. Perkembangan Islam di Jawa terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (a) krisis Indocina yang memperlemah kerajaan lokal saat itu; (b) perjuangan sufisme di Timur Tengah mendorong para pemuka Islam hijrah ke wilayah Timur yang dipandang masih sangat terikat dengan dunia mistis; (c) harapan masyarakat pesisir Jawa yang melihat Islam sebagai sebuah identitas baru untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan masa itu yang kian melemah; dan (d) pandangan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan untuk menentang masuknya pengaruh agama Katolik dan kekuasaan bangsa Portugis (Zahnd, 2001: 23).

Setelah ditetapkannya Kasultanan Ngayogyakarta sebagai pusat pemerintahan yang baru, Sultan HB I menata wilayah kekuasaannya dengan menentukan batas wilayah berdasarkan konsep *mancapat* serta mengangkat sejumlah pejabat dan abdi dalem. Dalam menata kota Jawa, masyarakat setempat tidak melihat wilayahnya dalam batas fisik yang mengelilinginya, namun pada dimensi kosmologis yang bermakna lebih luas (Wiryomartono, 1995: 30). Laut dan gunung sebagai elemen alamiah kota diyakini sebagai tempat tinggal kekuatan roh yang berperan menentukan pola bentuk kota sehingga dibangun garis axis utara-selatan yang menghubungkan antara Laut Kidul, Kraton Punggung Krapyak, Tugu dan Gunung Merapi. Konsep kosmologi Jawa yang diterapkan pada Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh ajaran

³ *Mancapat* adalah konsep ruang yang menekankan adanya tumpuan atau orientasi kota pada satu titik pusat dengan empat arah mata angin; merupakan hasil proses sinkretisme budaya Jawa dengan budaya Hindu. Konsep *mancapat* memperoleh pengaruh dari kosmologi Hindu yang dikenal dengan istilah *Jambudvipa*.

Hindu, yaitu yang dimulai dari tempat asal mula roh sampai ke tempat tujuannya manusia dengan Tuhan (Setiadi, 2010:51-52).

Selain pengaruh dari ajaran Islam, paham modern dan konsep urban Barat turut mewarnai perkembangan Kota Yogyakarta. Sejak tahun 1811, Belanda mulai menguasai Yogyakarta dan berusaha menyusun strategi politik untuk melemahkan wibawa dan kekuatan hegemoni kraton di mata pengikutnya. Strategi yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan cara membangun sistem jaringan kereta api yang memotong pola kosmologis Kota Yogyakarta yang menghubungkan utara-selatan serta pembangunan sejumlah sarana militer, fasilitas umum, kompleks pemerintahan, dan area permukiman Eropa di sekitar pusat kota. Perpaduan antara pola pikir pemerintah feodal kraton yang berdirikan Jawa Islam dengan Kolonial Belanda yang berambisi untuk menaklukkan Yogyakarta, mengakibatkan karakteristik fisik Kota Yogyakarta menjadi berpola hibrida (campuran), yaitu antara pola berpola tradisional dengan modern. Perpaduan antara pola pikir dan budaya tersebut tentunya akan berdampak pada perkembangan Ruang Kauman selanjutnya.



Gambar 3.15 Konsep kosmologi Kota Yogyakarta

Sumber gambar: www.kompasiana.com, 2011, digambar ulang oleh penulis,

(2013)

Proses Sinkretisme Dalam Budaya Jawa

Proses pencampuran budaya antara Jawa dengan Islam dapat berlangsung karena kemampuan Islam dalam menyikapi perbedaan budaya dengan cara yang baru, yaitu bersikap menghormati dan menghargai budaya lokal sehingga Islam secara tidak langsung turut memelihara identitas budaya setempat. Sedangkan budaya Jawa memiliki kemampuan untuk menyerap pengaruh budaya asing serta mengintegrasikan pengaruh tersebut tanpa menghilangkan identitasnya sebagai masyarakat Jawa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinkretisme merupakan keunggulan budaya Jawa, yaitu kemampuan untuk memadukan antara pengaruh budaya luar dengan jati diri sehingga luluh menjadi satu entitas pribadi yang semakin kaya.

Pada era Hindu Buddha, menurut inskripsi historis pada Prasasti Kutai, bahwa proses sinkretisme budaya Jawa dengan budaya Hindu Buddha turut mempengaruhi perkembangan pola permukiman dan sistem politik kenegaraan Jawa. Masyarakat Jawa mengenal adanya mita *jagad gedhe*, yaitu alam (makrokosmos) dan *jagad cilik* (mikrokosmos) sehingga dibutuhkan keselarasan antara alam sebagai roh suci pemberi kehidupan dengan manusia yang harus senantiasa berterima kasih kepada alam melalui pemberian sesaji atau persembahan kepada roh (Supriyono dalam Setiadi, 2010: 44-45). Kepercayaan yang dianut mengakibatkan masyarakat Jawa selalu berpedoman pada satu prinsip ketika membangun yang disebut *memayu hayuning bawana*⁴. Perwujudan prinsip tersebut dapat diamati pula dari pola perilaku sehari-hari masyarakat setempat, prosesi keagamaan, dan praktik ilmu Kejawen (dalam istilah Islam disebut *tasawuf*). Misalnya penghormatan terhadap roh leluhur dengan mengunjungi makam pada bulan Ruwah sebelum puasa, yang dikenal pula sebagai tradisi nyadran. Apabila diamati dari tatanan sosial kemasyarakatan Jawa, terdapat

⁴ *Memayu hayuning bawana* berarti sikap untuk selalu menjaga keselarasan dengan alam sekitar.

tiga kelompok Islam yang dinilai sangat berpengaruh, yaitu (a) kaum priyayi yang merupakan penganut Islam intelektual, namun cenderung menolak dogma Islamiah karena lebih mementingkan elemen mistik dalam kehidupan setempat; (b) kaum santri yang merupakan penganut Islam murni yang lebih mementingkan dogma Islamiah dan menolak dogma mistik meskipun secara sosial kaum santri lebih dekat dengan kaum priyayi daripada dengan kaum abangan; dan (c) kaum abangan yang merupakan kelompok rakyat biasa yang kurang memperhatikan Islam intelektual dan dogma Islamiah, namun lebih mementingkan keyakinan mistis Jawa (Geertz dalam Zahnd, 2005: 26-27).

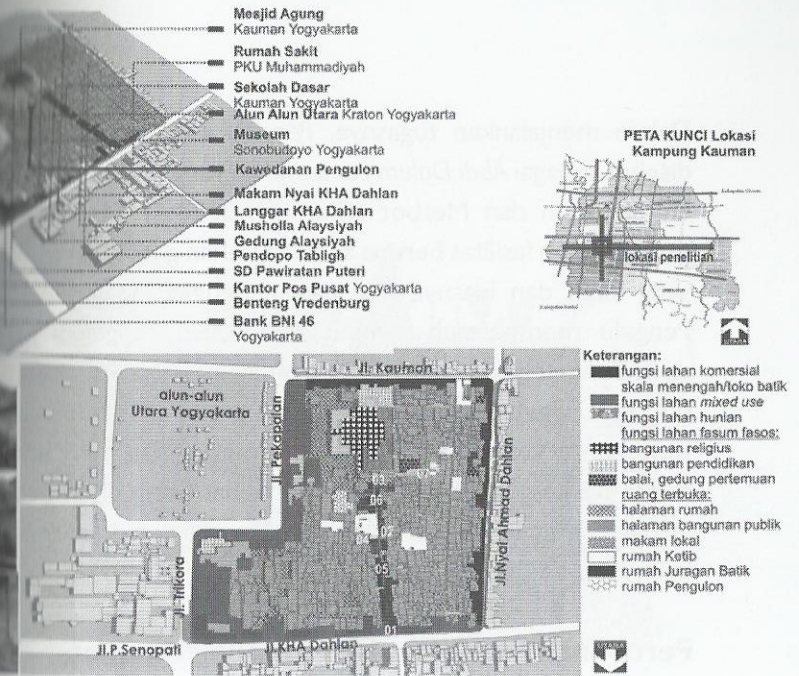
Kauman: Realitas Kampung Islam di Kota Yogyakarta

Istilah "Kauman" dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang berada di sekitar masjid dengan penduduknya yang menganut agama Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011). Sedangkan, dalam bahasa Arab, "Kauman" berarti pemuka agama Islam yang berasal dari kata *qo'um muslimin*. Istilah "Kauman" di Kota Yogyakarta berarti tempat tinggal masyarakat kebanyakan yang berasal dari kata *nggone wong kaum*, sama halnya dengan di Kota Kudus yang berasal dari kata *pakuaman*; sedangkan di Semarang, berarti kaum yang aman yang berasal dari kata *kaum sing aman* sehingga secara umum "Kauman" dapat diartikan sebagai tempat tinggal para pemuka agama Islam (Wijanarka, 2005:25-26).

Kampung Kauman Yogyakarta berada di daerah ndalem kraton dan secara politik merupakan bagian dari wilayah administratif Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan dengan batas utara berupa Jalan KHA Dahlan, sebelah selatan berupa Jalan Kauman, sebelah Barat berupa Jalan Pekapalan dan Jalan Trikora serta sebelah Timur yang berbatasan dengan Jalan Nyai Ahmad Dahlan. Kampung Kauman Yogyakarta merupakan komunitas homogen yang disatukan

oleh adanya pertalian darah yang dihasilkan dari perkawinan endogami. Selain erat berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam, sejarah perkembangan Kampung Kauman juga tidak terlepas dari kebijakan politik Sultan. Sultan HB I merencanakan adanya pembagian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta yang didasarkan pada sejumlah lingkaran konsentrik. Kraton ditempatkan sebagai pusat kota dan kemudian diikuti oleh wilayah kepatihan, yaitu *nayaka* atau *bupati nyai* (bupati dalam), *kadipaten* (putra mahkota) serta *pangulon* (kompleks para abdi dalem). Setiap kelompok memiliki wilayah permukiman yang disebut *ndalem* dan dibangun di atas lahan kosong (Setiadi, 2010: 36). Dalam konsep pertanahan tradisional, Sultan dianggap telah mengambil alih hak milik lahan dari penduduk pribumi sebagai pemilik asli dan kemudian menyerahkan kembali hak yang dimenangkannya kepada para pengikutnya dengan memberlakukan 2 (dua) jenis kebijakan, yaitu *ing kang darbe* (pemilik) dan *ing kang manggoni* (yang menduduki tanah). Seorang penguasa (*ing kang gadhah parentah*) dapat mengklaim hak tertentu atas sebidang tanah yang luasnya tidak diketahui secara pasti dan nilainya akan ditentukan secara tradisional (Setiadi, 2010: 36-37).

⁵ Perkawinan endogami adalah perkawinan yang terjadi antarsaudara yang disepakati sebagai bagian dari adat istiadat setempat dengan tujuan untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan keluarga, menjaga hubungan kekerabatan antarkeluarga di wilayah setempat yang sekaligus merepresentasikan sikap tertutup terhadap pengaruh dari luar.



Gambar 3.16 Sebaran fungsi lahan dan bangunan Kampung Kauman Yogyakarta

(Sumber gambar: dokumen penulis, 2012)

Sejak periode Mataram Islam, penguasa kerajaan telah menjadikan Islam sebagai agama negara sehingga masjid tidak hanya difungsikan sebagai wadah penyiaran ajaran Islam (Rochym, 1987:15), namun juga sebagai simbol kekuasaan. Pembangunan masjid Agung berkiblat ke arah Timur-Selatan mengikuti garis *axis* terhadap alun-alun utara Yogyakarta dan tidak berkiblat ke Mekah sebagaimana umumnya masjid. Berkaitan dengan pengelolaan Masjid Agung Kauman, Sultan HB I melimpahkan tugas tersebut kepada sekelompok *abdi dalem* (*kawedanan Pangulon*) dengan seorang *pengulu* sebagai pimpinan. *Pengulu* bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan serta budaya lokal, seperti pernikahan, talak, rujuk, juru tunel makam, naib, hukum dalam peradilan agama dan kemasjidan.

Dalam menjalankan tugasnya, *Pengulu* dibantu oleh aparaturnya yang disebut sebagai *Abdi Dalem Pamethakan* yang terdiri dari *Ketib*, *Momod Barjamangah* dan *Merbot* (Chawari, 2008:41-44). Para *abdi dalem* memperoleh fasilitas berupa sebidang lahan gadhuan di sekitar masjid yang letak dan luasnya disesuaikan dengan jabatan masing-masing. *Pengulu* memperoleh tempat di *Ndalem Pangulon* yang terletak di sebelah utara Masjid Agung yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai kantor dinas. Seluruh kompleks *Kawedanan Pangulon* pada awalnya merupakan milik kraton, namun dalam perkembangannya tanah gadhuan yang ditempati oleh *ketidimodin*, *barjamangah* dan *merbot* telah menjadi hak milik penghuni dan keluarganya (Darban, 2000: 13-14).

Perubahan Karakteristik Kampung Kauman

Sejumlah bangunan di Kampung Kauman telah mengalami perubahan yang cukup mengkhawatirkan sehingga untuk menghindari terjadinya perubahan yang semakin tidak terkendali, dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap setiap aktivitas pembangunan di dalam kampung. Meskipun gejala perubahan mulai terlihat, tradisi Islam Jawa tetap kuat menjiwai kehidupan warga, seperti kegiatan pengajian secara rutin, ritual *nyadran* hingga upacara adat *Grebeg* yang dilaksanakan di pelataran Masjid Agung Kauman.



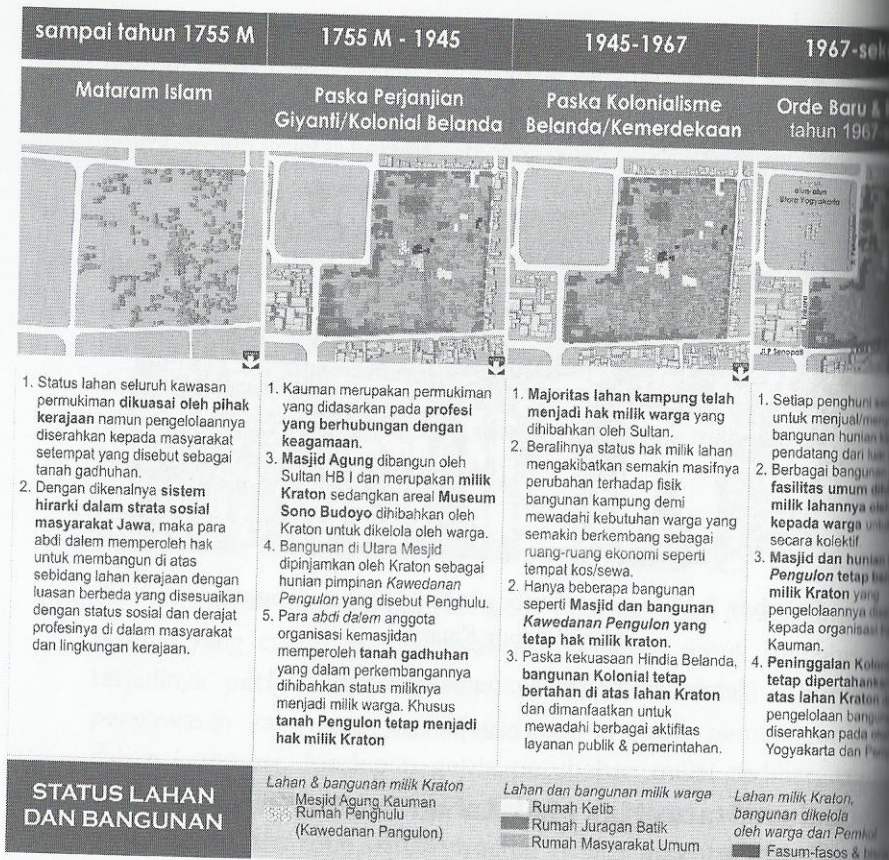
Gambar 3.17 Upacara Grebeg Maulud Kraton di pelataran Masjid Agung Kauman.

(Sumber gambar: www.tourbalijava.com (2011), digambar ulang oleh penulis, 2013)

Perubahan Status Hak Milik Lahan dan Bangunan Kampung Kauman

Peralihan status hak milik lahan/bangunan yang diberikan oleh sultan kepada warga Kauman merupakan hal penting untuk dikaji. Diduga bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu yang mengakibatkan praktik modifikasi terhadap fisik bangunan oleh setiap penghuni menjadi semakin merebak. Perubahan terhadap karakteristik Kampung Kauman akan semakin tidak terkendali apabila tidak tersedia sebuah manajemen kontrol yang menuntut partisipasi aktif dari warga Kauman dan aparat lokal.

⁶ Upacara *grebeg* merupakan upacara adat Kraton yang dilaksanakan 3 kali setahun yaitu *Grebeg Syawal* (pada hari raya Idul Firi), *Grebeg Besar* (pada hari raya Idul Adha) dan *Grebeg Maulud/Grebeg Sekatenan* (pada hari raya Maulid Nabi).



Gambar 3.18 Perubahan status hak milik lahan-bangunan Kampung Kauman

(Sumber gambar: Analisis, 2012)

Meskipun kepemilikan lahan dan bangunan di kawasan Kampung Kauman saat ini sebagian besar telah dihibahkan oleh sultan kepada warga setempat, beberapa bangunan penting, seperti Masjid Agung Kauman dan bangunan rumah Pengulon, tetap menjadi milik kraton yang pengelolaannya diserahkan kepada warga Kauman. Sebagian

bangunan lokal pada masa awal berdirinya Kraton Yogyakarta masih berstatus *ngindung* (mendiami tanah dan atau bangunan orang lain atau *magersari* (orang yang rumahnya menumpang pada halaman tanah/pekarangan orang lain). Selain rumah masyarakat umum, bangunan rumah di dalam Kampung Kauman yang kini telah berstatus hak milik perseorangan adalah termasuk rumah-rumah dengan luasan yang cukup besar milik para *Ketib* dan Juragan Batik. Setelah terjadi hilangnya popularitasnya, rumah para *Ketib* dan Juragan Batik beralih fungsi menjadi tempat usaha untuk bisnis pondokan atau *asrama* yang akan disewakan dan dikontrakkan. Selain untuk bisnis pondokan/asrama, sebagian kecil bangunan hunian lainnya mengadopsi konsep fungsi campuran (*mixed-use*) antara fungsi hunian dengan fungsi komersial berupa toko, warung makan dan bahkan sarung busa. Sedangkan fasilitas publik, seperti masjid, langgar, mushola, rumah RW, gedung serba guna, madrasah dan pesantren sebagai elemen penting kampung, tetap berperan sesuai dengan fungsinya. Berbeda dengan karakteristik aktivitas di bagian inti Kampung Kauman, aktivitas perdagangan berskala lokal ataupun kota terkonsentrasi di sepanjang koridor utama kota yang membingkai wilayah Kampung Kauman. Aktivitas perdagangan skala lokal yang menjual batik khas Kauman melalui fungsi pertokoan ataupun pusat bisnis yang berhubungan kebutuhan masyarakat muslim terkonsentrasi pada koridor Jl. Kauman, Jl. Nyai KHA Dahlan, Jl. Trikora, dan Jl. Perkapalan. Sedangkan aktivitas perdagangan, bisnis, fasilitas umum dan komersial berskala kota tersebar di sepanjang Jl. KHA Dahlan.

Kebijakan sultan yang mengembalikan status hak milik lahan kepada warga kampung yang sekaligus merupakan pengikut setia kraton, memberi dampak positif bagi citra sultan sebagai sosok yang dekat dengan rakyatnya sehingga secara tidak langsung akan mempertebal semangat junjungan/pengabdian para abdi dalem terhadap sultan. Keuntungan lain yang diperoleh adalah

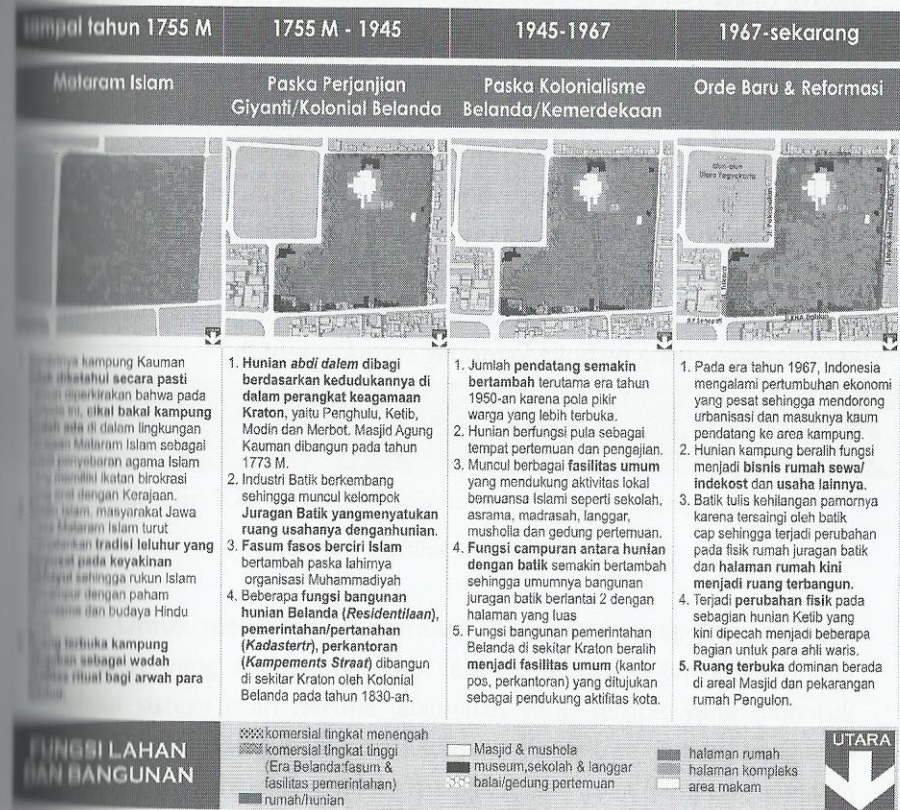
efektivitas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh aset kraton karena pengelolaan dan tanggung jawabnya diserahkan secara langsung kepada warga setempat. Namun, kebijakan tersebut dapat berdampak negatif karena justru memperluas keleluasaan penghuni untuk melakukan praktik pembangunan atau modifikasi fungsi ataupun wajah desain arsitektural bangunan lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa desakan ekonomi merupakan faktor yang mendorong praktik demikian oleh para penghuni. Semakin tinggi derajat keterbukaan warga terhadap kaum pendatang yang berminat untuk menyewa bahkan membeli hunian setempat, akan memperparah ancaman terhadap karakteristik kampung sehingga fungsi kendali dari pemerintah daerah yang melibatkan partisipasi aktif warga setempat merupakan kunci penting untuk menjaga kelestarian Kampung Kauman.

Perubahan Fungsi Lahan dan Bangunan Kampung Kauman

Perubahan yang terjadi pada Kampung Kauman dapat diamati dari perubahan fungsi lahan dan bangunan kampung. Perubahan fungsi lahan dan bangunan tidak sekadar disebabkan oleh pengaruh budaya luar, namun secara internal disebabkan pula oleh aturan kebijakan mengenai status hak milik lahan/bangunan yang diberikan oleh sultan. Selama ini, gerakan pelestarian telah dilakukan oleh warga Kauman melalui sebuah lembaga lokal/paguyuban yang bertugas mengawasi berbagai aktivitas pembangunan atau praktik modifikasi terhadap bentuk hunian. Terdapat kecenderungan perubahan pada beberapa bangunan lokal, namun mayoritas bangunan hunian Kampung Kauman tetap berperan sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal. Pada saat-saat tertentu, rumah berfungsi pula sebagai wadah kegiatan pengajaran yang dilakukan secara bergiliran.

Setelah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta dan Kraton Yogyakarta, gejala perubahan terhadap fisik hunian kampung mulai

terjadi seiring dengan semakin tumbuhnya industri batik yang awalnya diprakarsai oleh para istri *Ketib*. Pada awalnya, industri batik tumbuh untuk memenuhi kebutuhan sandang para anggota keluarga, kerajaan, dan kerabat kraton sekaligus untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Setelah memasuki era pasca kemerdekaan, aktivitas membuat mulai mengalami kemunduran sehingga ruang-ruang produksi batik kini beralih fungsi. Kebutuhan ekonomi yang semakin besar mengakibatkan perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi bisnis sewa dan kontrakan atau bisnis komersial lainnya.

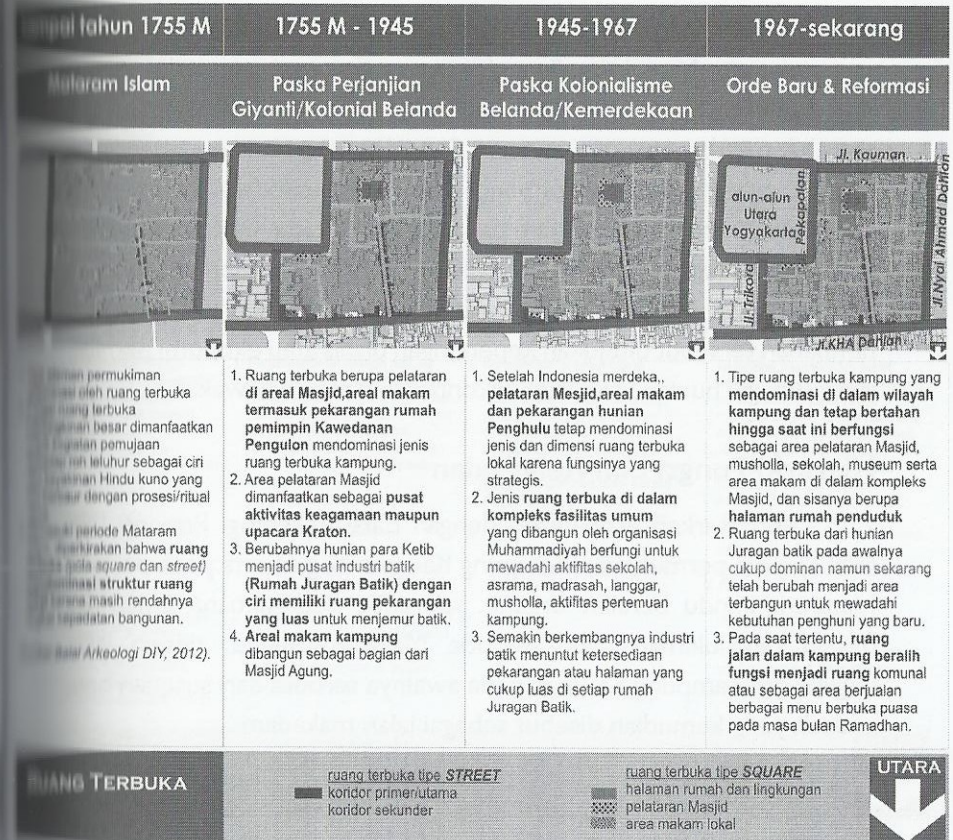


Gambar 3.19 Perubahan fungsi lahan dan bangunan Kampung Kauman

(Sumber gambar: Analisis, 2012)

Perubahan Pola Ruang Terbuka Kampung Kauman

Tidak berbeda dengan faktor yang melatarbelakangi perubahan pada fungsi lahan dan bangunan Kampung Kauman, perubahan yang terjadi pada pola ruang terbuka kampung turut dipengaruhi oleh kebijakan politik sultan berkaitan dengan peralihan status hak milik lahan, tuntutan ekonomi dan aktivitas sosial budaya setempat. Pola ruang terbuka Kampung Kauman pada era Mataram Hindu pada awalnya diperkirakan masih berpola acak dan terdapat sebuah kemungkinan bahwa ruang-ruang terbuka tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ritual, seperti upacara sesajen yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur. Pada masa Islam, terutama setelah lahirnya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912, tradisi Kejawaen berusaha dihilangkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam di dalam perilaku sehari-hari warga sehingga ruang-ruang yang ditujukan untuk ritual demikian semakin berkurang. Memasuki era modern, semakin besarnya derajat keterbukaan warga kampung terhadap kaum pendatang mengakibatkan tuntutan akan ruang hunian dan ruang ekonomi semakin tinggi sehingga ketersediaan ruang terbuka kampung semakin sempit.



Gambar 3.20 Perubahan pola ruang terbuka Kampung Kauman

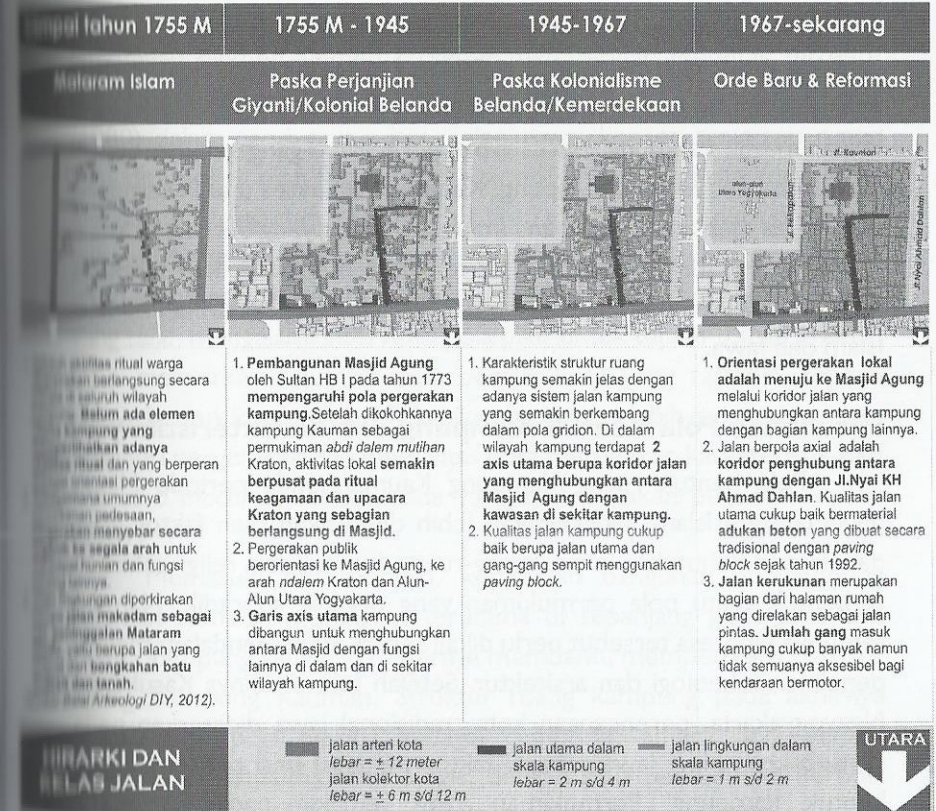
(Sumber gambar: Analisis, 2012)

Untuk mewedahi pergerakan warga kampung, dibangun akses jalan yang menghubungkan antara berbagai fungsi kampung melalui sistem jalan berupa jalan-jalan gang sempit yang dibentuk oleh deretan bangunan permukiman. Kehadiran setiap bangunan permukiman yang secara linear mengikuti alur jalan kampung semakin mempertegas pola struktur ruang kampung. Preferensi warga untuk

tetap mempertahankan sejumlah ruang terbuka publik, khususnya area pelataran Masjid dan Pangulon, mengekspresikan masih kuatnya tradisi Islam di dalam wilayah Kauman sebagai elemen utama yang membentuk identitas Kawedanan Pangulon. Perubahan dimensional pada ruang terbuka kampung yang memperlihatkan derajat perubahan yang relatif besar dapat diamati pada bangunan para *Ketib* atau Juragan Batik. Penghuni membangun ruang tambahan di areal halaman menggantikan fungsi sebelumnya sebagai ruang jemur batik. Ruang tambahan tersebut ditujukan kepentingan bisnis atau ekonomi pemilik, yaitu sebagai hunian yang akan dikontrakkan atau disewakan.

Hierarki Fungsi dan Kelas Jalan

Berdasarkan wawancara dengan Balai Arkeologi Provinsi DIY (2011), pola permukiman Kampung Kauman Yogyakarta pada periode Mataram Hindu bersifat organik sporadik. Sebagaimana umumnya desain permukiman pada periode Mataram Hindu, desain jalan lingkungan Kampung Kauman pada awalnya terbuat dari susunan batu andesit yang kemudian disebut sebagai jalan makadam.



Gambar 3.21 Perubahan hierarki fungsi dan kelas jalan Kampung Kauman

(Sumber gambar: Analisis, 2012)

Pasca berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta, permukiman di sekitar kraton dibangun dengan berdasarkan konsep penataan ruang dalam kosmologi Jawa. Jalan utama kampung dibangun dengan mempertimbangkan konektivitas antara wilayah kampung dengan bangunan Masjid Agung sebagai orientasi utama pergerakan. Dalam perkembangannya, setiap bangunan permukiman didirikan menyesuaikan dengan garis *axis* atau jalan utama dalam kampung yang berorientasi ke masjid.

Pada era pasca kemerdekaan dan memasuki era modern, dengan semakin meningkatnya intensitas kebutuhan dan pergerakan ke luar wilayah kampung mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah akses keluar masuk kampung. Akses dibangun berupa gang-gang sempit di seluruh bagian/penjuru kampung. Keberadaan akses utama kampung dipertegas oleh adanya gerbang utama kampung yang bercorak desain arsitektural Kauman Kraton. Hal tersebut menyimbolkan identitas Kampung Kauman sebagai bagian dari kraton yang bercirikan budaya Islam dan Jawa.

Perubahan Pola Bentuk Kampung dan Karakteristiknya

Pola bentuk ruang Kampung Kauman pada periode Hindu dan Mataram Islam, diperkirakan lebih ditentukan oleh faktor alam dan faktor kebutuhan akan ruang-ruang hunian dan religi sehingga terbentuk suatu pola permukiman yang organik sporadik. Namun, tentunya hipotesa tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian arkeologi dan arsitektur. Setelah terbentuknya Kasultanan Ngayogyakarta, perencanaan kota tradisional Jawa didasarkan pada konsep kosmologi Jawa sebagai faktor penentu bagi perkembangan bentuk kampung. Permukiman yang semakin padat, terutama terjadi di sepanjang jalan utama kampung yang mengarah ke masjid sehingga secara tidak langsung pembangunan permukiman tersebut mempertegas struktur ruang kampung.

Pola bentuk kampung yang karakterisiknya menghubungkan antara elemen-elemen penting kawasan dengan masjid melalui jaringan jalan kampung dikategorikan sebagai pola bentuk kota *axial*. Hubungan kosmologis antara elemen masjid, alun-alun, dan kraton merupakan karakteristik dari konsep kota *city of faith*. Dalam keyakinan Islam, masjid merupakan orientasi hidup para pemeluknya, sedangkan kraton dipandang sebagai manifestasi dari kerajaan surgawi di dalam dunia mikrokosmos, sementara alun-alun berperan sebagai

ruang perantara yang menghubungkan kedua elemen tersebut. Hubungan elemen-elemen tersebut memberikan identitas tertentu bagi Kampung Kauman sebagaimana yang dikemukakan oleh Schultz (1980) dalam teori *genius loci*. Selanjutnya, konsep penataan ruang yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum di sekitar wilayah Kampung Kauman turut mempengaruhi perkembangan pola bentuk Kampung Kauman. Menurut Trancik (1986), pola bentuk kota, yang telah mengalami intervensi pola pikir untuk tujuan-tujuan praktis, akan melahirkan sejumlah pola bentuk kota yang rasional, seperti halnya bentuk kota angular. Pola pikir mesin yang lebih mengedepankan efisiensi pergerakan dan efektivitas kota merupakan karakteristik dari *city as a machine*, sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Lynch (1981).

Memasuki era modern, kepadatan bangunan di Kampung Kauman semakin meningkat terutama di sepanjang garis-garis axis utama kampung yang pada akhirnya membantu mempertegas struktur ruang Kampung Kauman. Struktur ruang kampung pada akhirnya membentuk pola hibrida sebagai campuran antara pola bentuk *axial*, yang bermakna kosmologis, dengan pola permukiman berpola angular, yang bersifat rasional. Dalam kajian Lynch (1981), campuran antara beberapa bentuk ruang akan menghasilkan pola bentuk kota hibrida. Pola bentuk kawasan atau kota hibrida mencerminkan tingkat kompleksitas aktivitas kota yang cukup tinggi sekaligus memperlihatkan kemungkinan adanya permasalahan dualisme budaya yang umumnya dihadapi oleh kota-kota tradisional. Dalam kategorisasi Lynch (1981), karakteristik demikian terdapat pada konsep kota, *city as an organism*.

PERIODE KAJIAN	Mataram Islam sampai tahun 1755 M	Paska Perjanjian Giyanti/ Kolonial Belanda 1755-1945	Paska Kemerdekaan 1945-1967	Orde Baru Reformasi 1967-sekarang
Pola Bentuk Ruang Kawasan Kampung Kauman Yogyakarta				
Pola Bentuk Ruang Menurut Trancik				
Analisis	Budaya <i>Indigenious</i> Hindu-Buddha, mantap dan utuh <u>Arsitektur Tradisional</u> (permukiman berpola organik sporadik) akses ke dalam kawasan permukiman lama bersifat sporadik	Sinkretisme Budaya Islam, Jawa & Kolonial <u>Arsitektur Tradisional</u> (berpola axial organik, konsep kota kosmik Jawa penghubung alun-alun, kraton dan Masjid mempengaruhi bentuk struktur ruang kampung)	Budaya Islam, Jawa, Kolonial Belanda & Modernisasi budaya tradisional, modernisasi <u>Arsitektur Tradisional, Kolonial & Modern</u> (permukiman berpola axial organik, pengaruh modernisasi mempengaruhi bentuk struktur ruang kampung melalui axis jalan)	Budaya Islam, Jawa, Kolonial Belanda & Modernisasi budaya tradisional, modernisasi <u>Arsitektur Tradisional, Kolonial & Modern</u> (permukiman berpola axial angular, modernisasi semakin mempertegas bentuk struktur ruang kampung melalui axis-axis jalan)

Gambar 3.22 Perubahan pola bentuk ruang Kampung Kauman

(Sumber gambar: Analisis, 2012)

Kesimpulan

Proses Transformasi Pola Bentuk Ruang Kampung Kauman

Pasca terbentuknya wilayah Kasultanan Ngayogyakarta, penataan pola bentuk ruang kampung sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik sultan. Konsep kosmologi Jawa yang diterapkan oleh Sultan HB I

dalam menata Kota Yogyakarta dengan menghubungkan antara dunia mikrokosmos dan makrokosmos, antara elemen alun-alun, kraton, dan masjid, menyimbolkan karakteristik kota kosmik. Selain faktor agama, faktor budaya maupun politik dan ekonomi turut menentukan arah perkembangan kampung. Berdasarkan pengamatan di lapangan, axis mundi kampung bermakna kosmologis yang menghubungkan antara elemen kraton, masjid, dengan alun-alun, tetap bertahan, meskipun telah terlihat adanya gejala perubahan yang diakibatkan oleh faktor politik, sosial dan budaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar kampung.

Elemen Pembentuk Identitas Kawasan

1. Variabel: Status Hak Milik Lahan

Elemen pembentuk identitas Kampung Kauman adalah bangunan tempat tinggal *Pengulu* dan fungsi lahan religius berupa area Masjid Agung Kauman yang berstatus milik kraton. Bangunan yang berdiri di atas kedua lahan tersebut merupakan milik kraton sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada warga Kauman.

2. Variabel: Fungsi Lahan dan Bangunan

Beberapa elemen pembentuk identitas Kampung Kauman adalah bangunan religius berupa Masjid Agung Kauman, musholla; bangunan fasilitas sosial berupa langgar, balai pertemuan, Sekolah Dasar Aisyah, pendopo, Madrasah Muhammadiyah, termasuk elemen gerbang kampung yang tersebar di seluruh bagian Kampung Kauman; ruang terbuka kampung berupa makam Kauman, halaman masjid dan halaman rumah penghulu; bangunan komersial berupa pertokoan di sepanjang Jl. Kauman dan Jl. Nyai KHA Dahlan serta bangunan tempat tinggal/hunian, khususnya rumah *pengulu*, rumah *Ketib*, para *abdi dalem pamethakan* dan Juragan Batik.



Gambar 3.23 Gerbang Utama kampung dari arah Jalan KHA Dahlan mempresentasikan ciri arsitektur Kauman.

Sebagai elemen utama identitas kampung yang sekaligus menjadi pusat aktivitas agama Islam di tingkat kerajaan, Masjid Agung Kauman Yogyakarta dibangun dengan desain bentuk yang terkesan megah dan berukuran luas, serta dengan detail desain yang rumit (Rochym, 1987: 61-73). Masjid Agung dibangun sebagai simbol kekuasaan dan direncanakan mengikuti sumbu Alun-alun Utara Yogyakarta sehingga tidak sepenuhnya memperhitungkan arah kiblat ke Mekkah secara tepat. Mengingat karakteristik umat Muslim yang toleran terhadap budaya setempat, desain elemen bangunan masjid turut menyesuaikan dengan corak lokal dengan mengadopsi desain ornamen Jawa atau kraton yang bermakna simbolik. Beberapa hal yang menjadi ciri khas Masjid, yaitu terdapatnya *maksurah* sebagai tempat khusus untuk sholat sultan

beserta kerabatnya, atap susun masjid dengan atap ruang utama yang posisinya lebih tinggi dibandingkan atap pada ruangan sekitar, ornamen bermotif pakem kraton, serta suasana interior yang gelap untuk menambah kesan mistis. Masjid menempati areal lahan yang cukup luas untuk menampilkan bentuk keseluruhan dari berbagai arah sehingga kesan monumentalitas dapat tercapai. Dinding pembatas yang mengitari kompleks masjid ditujukan untuk menegaskan/memisahkan masjid dari lingkungan sekitar secara hierarkis dan dalam konteks kawasan menjadi pusat dan orientasi hidup sehari-hari warga lokal.

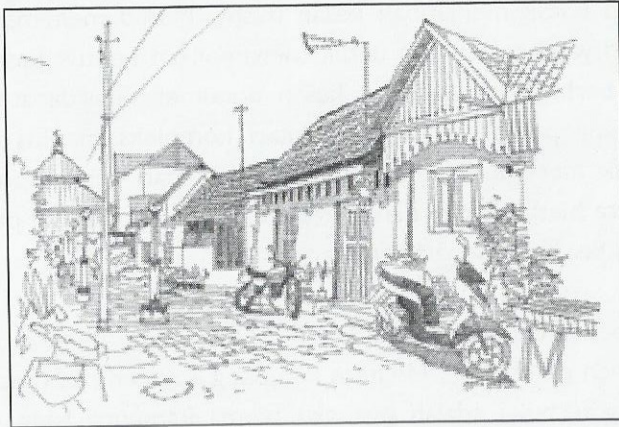
1. Variabel: Pola Ruang Terbuka

Elemen pembentuk identitas kampung Kauman pada aspek pola ruang terbuka adalah dua *axis* utama kampung yang didesain mengarah ke Masjid Agung. Secara simbolis, pola struktur ruang terbuka demikian mengekspresikan orientasi hidup warga Kauman yang memegang teguh ajaran Islam dan kemudian dimanifestasikan dalam wujud masjid. Karakteristik fisik yang sama dapat dijumpai pada kota-kota Islam di Timur Tengah. Fungsi ruang terbuka publik pada area masjid, makam kampung, dan halaman rumah *pengulu* adalah beberapa jenis *square* lokal yang harus dipertahankan sebagai elemen pembentuk identitas Kampung Kauman.

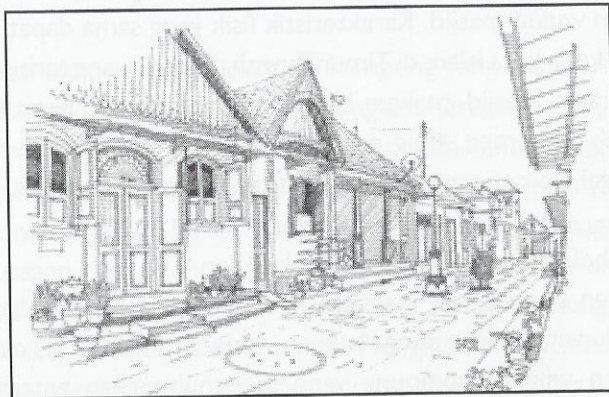
4. Variabel: Hierarki Fungsi dan Kelas Jalan

Elemen pembentuk identitas kawasan pada aspek jalan adalah koridor utama kampung Kauman, yang terdiri dari: (1) *axis* utara-selatan wilayah kampung yang menghubungkan antara Masjid Agung Kauman dengan Jl. KHA Dahlan; (2) *axis* barat-timur yang menghubungkan antara Masjid Agung Kauman dengan Jalan Nyai Ahmad Dahlan. Kedua koridor jalan tersebut dipertegas oleh

deretan dinding dan struktur bangunan permukiman di sepanjang koridor.



Gambar 3.24 Axis utama kampung menuju Masjid Agung sebagai simbol orientasi hidup dan pergerakan warga



Gambar 3.25 Axis kampung menuju Jl.Nyai H.Ahmad Dahlan merefleksikan identitas Kauman sebagai kampung Islam-Kraton melalui desain bangunannya di sepanjang koridor

Faktor-faktor Pengaruh Perkembangan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa faktor dominan yang mempengaruhi perubahan pola bentuk ruang kampung Kauman, yaitu: (1) aspek politik; kebijakan kraton merupakan faktor dominan yang mempengaruhi proses transformasi Kampung Kauman mengingat bahwa tugas utama warga yang tinggal di dalam Kampung Kauman adalah sebagai abdi dalem kraton. Aktivitas utama para abdi dalem senantiasa dikaitkan dengan kewajiban dan tugas pengabdian terhadap sultan ataupun keluarga kraton. Namun, kebijakan peralihan status hak milik lahan dan bangunan oleh sultan ditambah dengan masuknya pengaruh modernisasi, telah mengakibatkan beberapa perubahan pada fisik kampung. Untuk mengantisipasi perubahan yang tidak terkendali, didirikan sebuah organisasi setempat yang bertugas mengawasi setiap praktik pembangunan yang berlangsung sehingga identitas Kampung Kauman sebagai kampung Islam dan sebagai bagian dari wilayah kraton tetap terjaga; (2) aspek sosial budaya; aktivitas sosial budaya warga setempat tidak lepas dari tanggung jawabnya terhadap kraton sehingga sebagian besar aktivitas warga senantiasa berhubungan dengan ritual keagamaan dan upacara-upacara/prosesi kraton. Nilai-nilai agama Islam yang mengatur perilaku hidup sehari-hari (misal: melaksanakan lima kewajiban Muslim yang disebut sebagai Pilar Islam) berakulturasi dengan nilai-nilai modern sehingga mengakibatkan pola bentuk struktur ruang kampung yang bersifat hibrida. Keterbukaan warga terhadap masuknya para pendatang dari luar daerah memberi andil pula bagi terjadinya perubahan pada fisik bangunan kampung; (3) aspek ekonomi; semakin bertambahnya kebutuhan dan tuntutan ekonomi mendorong sebagian warga Kauman melakukan modifikasi terhadap bangunan hunian, yaitu menjadi ruang usaha atau bisnis rumah sewa/ kontrakan.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berikut ini sebagai bahan rekomendasi desain Kampung Kauman sehingga identitas lokal tetap terpelihara.

etiap kegiatan pembangunan Kampung Kauman di masa yang akan datang harus mempertimbangkan kelestarian seluruh elemen pembentuk identitas kawasan sebagaimana yang telah disimpulkan. Pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pelestarian cagar budaya dan pelestarian terhadap bentuk dan fungsi elemen utama kampung dengan melibatkan partisipasi warga secara aktif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

Warga Kauman diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap program pembangunan kampung serta mengantisipasi setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi mengancam kelestarian cagar budaya dan elemen penting kampung.

Akademisi dan pihak swasta diharapkan mampu mendukung pelestarian kampung Kauman dengan menyelenggarakan penelitian secara kontinu dan melakukan gerakan pelestarian untuk menjaga identitas dan karakteristik Kampung Kauman.

Arsitek kawasan dan kota diharapkan dapat memberikan rekomendasi desain yang mampu mengakomodasi kebutuhan akan pelestarian sekaligus kebutuhan untuk mawadahi tuntutan modern dengan menciptakan peluang bagi tumbuhnya ruang-ruang ekonomi baru sehingga kesejahteraan warga Kauman semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Chawari, M., 2008, *Tesis: Bangunan Rumah Tradisional Jawa di Kampung Kauman Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Program Studi Arkeologi Program Pascasarjana.
- Darban, A.A., 1984, *Kampung Kauman Sebuah Tipologi Kampung Santri*

di Perkotaan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Sastra.

- Garnham, H.L., 1984, *Maintaining the Spirit of Place*, Arizona: PDA Publishers Corporation.
- Larkham, P.J., 1996, *Conservation and the City*, London: Routledge.
- Lynch, K., 1960, *The Image of The City*, USA: The M.I.T. Press.
- Morris, A.E.J., 1994, *History of Urban Form Before The Industrial Revolutions*, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Moudon, A.V., 1994, *Ordering Space: Getting to Know the Built Landscape*, Cambridge, MA., MIT Press.
- Rochym, A., 1987, *Masjid dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Setiadi, A., 2010, *Arsitektur Kampung Tradisional*, Yogyakarta: PT.Kanisius.
- Schultz, C.N., 1980, *Genius Loci: Towards A Phenomenology of Architecture*, New York: Rizzoli.
- Shane, D., 2005, *Recombinant Urbanism*, Great Britain: John Willey & Sons Ltd.
- Trancik, R., 1986, *Finding Lost Space*, New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Wijanarka, 2001, *Teori Desain Kawasan Binaan*, Palangkaraya: Universitas Palangkaraya Program Studi Teknik Arsitektur.
- Wiryomartono, A.B., 1995, *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zahnd, M., 2008, *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Internet: www.kompasiana.com, 2011, *The Other Side of Yogyakarta*, Publikasi 12 September 2011.
- Internet: www.tourbalijava.com, 2011, *Tradisi Grebeg Syawal Kraton Yogyakarta*, Publikasi Agustus 2011.
- Internet: www.architexting.com, 2011, *Architexting: Architecture, Urbanism, Design*, Publikasi 15 Agustus 2011.

KONSERVASI ARSITEKTUR KOTA YOGYAKARTA

Suatu kota bagaikan organisme hidup, yang juga tumbuh berkembang menyedot sumber daya serta menghasilkan buangan. Sebuah kota hendaknya dapat dilihat dan dirasakan nuansanya yang kontinu mulai dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa yang akan datang. Konservasi arsitektur dan lingkungan kota menjadi pilihan untuk menjembatani kontinuitas itu. Buku ini mencoba mengkaji perkembangan arsitektur Kota Yogyakarta dengan melihat latar belakang sejarah, mengupas perkembangan fisik Kota Yogyakarta dengan berbagai arsitektur yang mewarnainya, mempertimbangkan segala aspek nonfisik yang dominan mempengaruhinya, serta upaya dalam menjaga kelestarian budaya, arsitektur, dan lingkungan kota. Rangkaian tulisan yang tersaji merupakan bagian kecil dari hasil penelitian serta kajian studi mata kuliah yang ada di lingkungan Laboratorium "Perencanaan Perancangan Lingkungan dan Kawasan", Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sangat berguna bagi para pemerhati arsitektur, khususnya arsitektur kota, para penentu kebijakan, mahasiswa, serta siapa saja yang peduli akan arsitektur dan sejarah yang membentuknya.

ISBN 978-979-21-3574-9



9 789792 135749

PENERBIT KANISIUS
Jl. Cempaka 9, Deresan
Yogyakarta 55281



072352